

**SANKSI HUKUM TERHADAP KESALAHAN MATRIMONI DI MAHKAMAH
SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
(STUDI KASUS MENGANIAYA ISTRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



OLEH:

HENI SARIFATUL HASANAH BTE SUDIRMAN

NIM : 10821004926

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASSIM

RIAU 2012 M/1432 H

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “SANKSI HUKUM KESALAHAN MATRIMONI DI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (STUDI KASUS MENGANIAYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984) Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) tempat di mana penulis menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah adanya tindak kekerasan menganiaya isteri di Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang bertentangan dengan Seksyen 127 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, penelitian ini untuk menguraikan analisis kasus-kasus kesalahan Matrmoni menganiaya isteri di Mahkamah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kesalahan matrimony, bagaimana sanksi hukum terhadap kesalahan matrimony tersebut, dan bagaimana tinjauan AUKI Wilayah Persekutuan 1984 menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Adapun populasinya ada 218 kasus, penulis mengambil sampel sebanyak 10% yaitu 21 kasus. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer Yaitu data yang diambil dari responden melalui informasi dari hasil wawancara mendalam, dan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai analisis dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan observasi yaitu melihat dan meninjau langsung ke Mahkamah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kesalahan matrimony, apa saja sanksi hukum terhadap kesalahan matrimony dan untuk melihat sejauh mana keberkesanan diberlakukannya sanksi hukum bagi yang melanggarnya berdasarkan AUKI 1984 dalam kasus tersebut.

Setelah data terkumpul penulis melakuakn analisa datadengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dan digambarkan dengan teknik penulisan deduktif, dan deskriptif. Didapati hasil daripada penelitian ini adalah bentuk-bentuk kesalahan matrimony yaitu : kesalahan suami, kesalahan isteri, dan kesalahan bersama. Bentuk kesalahan suami menganiaya isteri adalah kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Banyaknya kasus cerai fasakh yang di sebabkan oleh kesalahan matrimony ini terus berlaku di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan KL. Peneliti juga menyimpulkan banyaknya kasus cerai Fasakh yang di daftarkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Mahkamah Juga selain mengabulkan permohonan fasakh tersebut si pelaku di sabitkan juga sanksi hukum

terhadap kesalahan ini menurut AUKI WP 1984 adalah denda tidak melebihi Rm1,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali, adapun tinjauan hukum islam terhadap sanksi ini sejalan dengan hukum islam, namun sanksi yang dikenakan ini kurang efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat yang lain, seharusnya sanksi yang diberikan ditambahkan lagi hukumannya agar memberikan pengajaran bagi sipelaku dan masyarakat lain khususnya masyarakat Kuala Lumpur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur adalah milik Allah swt, yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan manusia tersebut adalah kurnia fikiran dan kecerdasan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw dan keluarga serta sahabat Baginda. Karena baginda adalah sosok yang telah berjasa memberi bimbingan terhadap aktualisasi pikiran dan kecerdasan kepada manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Sesungguhnya di dalam menyelesaikan penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini menghadapi ujian dan rintangan akibat dari beratnya topik pembahasan yang diteliti, namun penulis akhirnya memperoleh inspirasi dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini. Penulis berhasil menyiapkan skripsi yang berjudul **“SANKSI HUKUM TERHADAP KESALAHAN MATRIMONI DI MAHKAMAH SYARI’AH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (STUDI KASUS MENGANIAYA ISTERI BERDASARKAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN 1984)**

Adapun, dikesempatan yang berharga ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat yang mendalam serta terima kasih kepada :

- 1- Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tidak lupa juga

kepada Ayah dan Ibu mertua yang sentiasa mensupport penulis dalam segala hal dengan tulus dan kasih sayangnya.

- 2- Bapak Prof.Dr.H.M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau Beserta staf-stafnya.
- 3- Bapak Dr. Akbarizan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan seluruh Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Pembantu Dekan I, PD II, PD III.
- 4- Ibu Dr.Hertina M.Pd yang merupakan Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis.
- 5- Bapak Drs. Yusran Sabili selaku ketua jurusan Ahwal Al-syakhsiiyyah, Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/ti Fakultas Syariah dan ilmu Hukum UIN Suska yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN SUSKA.
- 6- Kepada Tuan Abdul Ghani Bin Kiflie selaku pendaftar, dan staf-staf di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang telah membantu dan meluangkan waktunya kepada penulis.
- 7- Secara khusus ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada Suami tercinta Wan Muhammad Saifullah Bin Wan Akashah yang telah memberi sokongan dan semangat yang luar biasa kepada penulis, begitu juga buat Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Malayasia di Pekanbaru (PKPMI-CPB), teman seperjuangan Ummu Hani dan Suaminya Zulfadhli Zafik,

serta teman-teman se-indonesia, teman-teman AH, teman-teman se fakultas Syariah, kasih sayang dan perhatian mereka telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, penulis hanya dapat mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memerlukan kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pelbagai pihak, terutama insan akademik.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan Terima Kasih Semua, semoga karya tulis ini memberi manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 06 03 2012

Penulis

HENI SARIFATUL HASANAH

NIM:10821004926

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : GAMBARAN MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Syariah	19
B. Visi, Misi, Objektif jabatan Kehakiman Syariah wilayah Persekutuan	22
C. Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah Syariah	25
D. Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah	27

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KESALAHAN *MATRIMONI*

A. Pengertian <i>Matrimoni</i>	33
B. Jenis-Jenis Kesalahan <i>Matrimoni</i> Dalam Islam	36

C. Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan <i>Matrimoni</i> dari Perspektif hukum Islam	44
D. Statistik kesalahan <i>matrimony</i> terhadap Kesalahan Menganiaya isteri Di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur	49

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Bentuk-Bentuk Kesalahan <i>Matrimoni</i> Dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam WilayahPersekutuan1984.....	57
B. Sanksi Hukum Bagi Kesalahan <i>Matrimoni</i> terhadap	
C. Menganiaya Isteri dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam WilayahPersekutuan1984.....	74
D. Analisis hukum Islam	81

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Struktur Organisasi Mahkamah Syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur	32
TABEL 2	: Laporan Daftar Kasus Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2009.....	51
TABEL 3	: Laporan Daftar Kasus Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2009.....	53
TABEL 4	: Kasus Kesalahan <i>Matrimoni</i> Menganiaya Isteri di mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu yang di sunnahkan oleh Rasulullah SAW, namun pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad perkawinan. Bahkan ia bukan sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan tetapi suatu perjanjian suci atau akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah dalam membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, dan warrahmah*¹. Islam telah mensyari'atkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan manusia. Dalil-dalil yang mensyari'atkan perkawinan di ambil dari nash-nash Al-qur'an seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka

¹ Mohammad Ali Al-saboni, *Az-Azwaaj Al-Islaami Al-Mukkir: Sa'aadatun wa Hashaanatun*, penerjemah Hamdan Rasyid, *Pernikahan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 2004) Cetakan 1, h.33-3

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa : 3)²

Islam juga menggalakan umatnya supaya menikah, dan melarang membujang, karena perkawinan mempunyai faedah yang besar kepada individu dan masyarakat. Seperti hadist Rasulullah s.a.w berikut ini :

سعيد ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلا الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلا الله عليه وسلم قد غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدًا وقال اخر انا اصوم الدهر ولأفطر وقال اخر انا أعتزل النساء فلا أتزوج ابدًا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنني فليس مني (

Artinya : “Dari Sa’id bin Abi Maryam mengabarkan Muhammad Ibnu Ja’faron mengabarkan Humaidun bin Humaidin Thowil bahwasanya dia telah mendengar dari Annas bin Malik R.A berkata: telah datang tiga orang pemuda ke rumah isteri-isteri Nabi SAW, menanyakan tentang ibadahnya nabi SAW, bahwasanya Dosa-dosanya telah di ampunkan oleh Allah dan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, salah seorang daripada mereka berkata: “ sesungguhnya saya akan shalat malam pada tiap-tiap malam”, dan berkata yang lain dari mereka: “saya akan puasa sepanjang hari dan tidak berbuka”, dan berkata yang lainnya dari pada mereka:” saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah untuk selama-lamanya”. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, berkata: kamu sekalian berkata itu dan itu, Demi Allah saya sangat takut kepada Allah dan Bertaqwa kepa Allah, akan tetapi saya puasa, dan saya berbuka, saya shalat, saya tidur, dan saya menikahi wanita. Barangsiapa yang melanggar sunnahku maka ia bukan dari golonganku (ummatku) .“(H.R. Bukhari dan Muslim)³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, Q.S An-Nissa : 3, (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2006) h.77

³ Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibarahim bin Mughirah bin baridzah Bukhari Alp-ja’fiy, *Sahih Bukhari, Kitab An-Nikah Juz 5-6 H.R Bukhari dan Muslim*, (Cairo: Darul Hadist, 1981/1401 H) h.116

Ikatan perkawinan tidak menjanjikan kesenangan semata-mata, setelah akad ijab qabul di lafazkan bermakna pasangan suami istri tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar, lika-liku dan cobaan didalam rumah tangga harus di tempuh bersama. Alam rumah tangga menuntut sepenuhnya komitmen dari pasangan yang menikah namun untuk memegang komitmen ini tidak mudah untuk melaksanakannya. Namun semua itu tergantung kepada masing-masing pihak pasangan yang menikah dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu setiap pasangan yang menikah mengharapkan pernikahannya berkekalan dan tiada masalah-masalah yang dapat memusnahkan kebahagiaan rumah tangganya. Oleh karena itu suami istri diperintahkan hidup bersama dengan penuh kasih sayang dan rasa aman juga disertai rasa belas kasihan. Masing-masing suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang tersendiri didalam mengekalkan kerukunan sebuah rumah tangga. Salah satu tanggung jawab suami istri itu adalah memenuhi hak-hak pasangan masing-masing, menjalankan tanggung jawab, dan bersikap baik terhadap pasangan suami istri.

Namun tidak di nafikan kadangkala pertikaian diantara suami istri sering terjadi bahkan hingga ke tahap perceraian karena salah satu pihak ada yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya, krisis rumah tangga sering berlaku di tengah-tengah rumah tangga pasangan suami istri, seperti bertengkar, krisis rumah tangga tersebut kadang-kadang disebabkan oleh istri ataupun suami, seperti krisis rumah tangga yang disebabkan oleh istri karena tidak hormat kepada suami, sering marah-marah, dan benci kepada suaminya, faktor ini biasanya terjadi karena kedudukan, kecantikan dan pendidikan si istri. Krisis rumah tangga yang

disebabkan suami biasanya terlalu bersikap keras terhadap istri, tidak bergaul dengannya dengan cara yang baik, tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau menjalinkan hubungan dengan wanita lain. Hal tersebut bisa saja terjadi karena faktor diri seorang suami adalah kedudukan, pendidikan, pembawaan diri, pergaulan, persekitaran atau campur tangan pihak ketiga⁴. Apabila ada pasangan yang melakukan perkara yang menyalahi makna perkawinan yang dituntut oleh syari'at islam, ia di katakan telah melakukan kesalahan matrimoni. Contoh kesalahan matrimoni dalam Islam sebagai berikut:

1. Kesalahan suami

- Tidak memberi nafkah kepada istri
- Memudaratkan istri
- Enggan bersetubuh dengan istri
- Tidak berlaku adil (suami yang berpoligami)
- Menuduh istri berzina

2. Kesalahan istri

- Istri nusyuz

Kesalahan matrimoni dalam Islam dan kesalahan matrimoni dalam AUKI hampir sama, namun dalam Islam dibagi kepada dua kesalahan yaitu kesalahan suami dan kesalahan istri, sedangkan dalam AUKI Wilayah persekutuan 1984 dibagi kepada tiga kesalahan, yaitu kesalahan suami, kesalahan istri dan kesalahan

⁴ Mat Saad Abd Rahman, *Undang-undang Keluarga Islam Aturan Perkahwinan Suatu Pendekatan Amalan Berdasarkan Amalan Semasa*, (Selangor: Intel Multimedia And Publication, 2007) h. 268-269

bersama. Untuk ulasan berikutnya penulis akan menjelaskan kesalahan matrimoni dalam islam di bab 3.

Apabila muncul sesuatu yang tidak disukai dari suami janganlah seorang istri mengingkari dan melupakan semua kebaikan suaminya. Nabi saw telah memperingatkan dengan keras dan telah menerangkan bahwa kufur terhadap suami dan mengingkari kebaikannya adalah salah satu sebab masuknya seorang istri ke neraka.

Seorang suami juga tidak sepatutnya membenci pada istrinya, karena jika suami membenci sebagian akhlak istrinya disisi lain ia akan menyukai akhlak-akhlaknya yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An –Nisa : 19)⁵

Didalam Hadist sahih dari Abu Hurairah R.A, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا , وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

⁵ Ibid, Q.S An-Nisa:19. h.80

Artinya: “kaum mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada isterinya”.(H.R At-tarmidzi).⁶

Matrimoni berasal dari bahasa inggeris “*matrimony*” yang berarti dengan *marriage* ⁷. Di dalam bahasa Arab pula الجمع bermaksud berkumpul atau berhimpun. Manakala menurut istilah hukum yang bermaksud akad dengan menggunakan perkataan *Nikah* (), *Tajwiz* (تزوج) mengharuskan persetubuhan⁸. Dalam kamus Undang-undang dinyatakan bahwa “*matrimony*” bermakna gerbang perkawinan dan “ *matrimonial proceeding*” bermaksud prosedur perilaku suami istri (prosiding Hal Ehwal Suami Isteri).⁹

Allah swt berfirman dalam surat Al-a’raf ayat 201 :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya”. (Q.S Al-A’raf :201)¹⁰

Seperti yang terjadi baru-baru ini bahwa fenomena pergolakan rumahtangga yang berlaku dalam masyarakat semakin serius, dengan ini penulis ingin mengkaji tentang bentuk-bentuk kesalahan dan sebab-sebab perkara tersebut berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk mengetahui bentuk-bentuk

⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi Juz 1, Terjemahan Ahmad Yuswaji*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) h.728

⁷ A.S Hornby (1995), *Oxford Advanced Learner 's Dictionary, Fifth Edition*, (Oxford University Press) h 723

⁸ Sheikh Muhammad As-Sharbini Al-Khatib, *Mughi Al-Muhtaj, Juz 3*, (Mesir: Matbaah Mustafa Al-Hilbi, 1958), h .123

⁹ Salleh Buang,Naseer Hamid, Maimoonah Hamid (1995), *Kamus Istilah Undang-undang English-Malay*, (Central Law Book Corporation Sdn,Bhd), h 10

¹⁰ Mohd Hasnawi, *Suami Isteri yang di Redhoi*, (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2004), Cetakan Pertama, h. 24-29

kesalahan matrimoni ini di tinjau berpandukan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Dalam observasi awal, didapat fenomena kesalahan-kesalahan matrimoni ini di wilayah persekutuan semakin marak berlaku di tengah-tengah masyarakat dewasa ini berpandukan kepada kadar kasus-kasus di mahkamah Syaria'ah wilayah persekutuan.

Contoh Kasus : Pendakwa Syarie lawan Suhaimi bin Abdullah, dengan tergugat pada 17-05-2009, telah di jatuhi hukuman oleh Hakim mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan denda tidak melebihi RM 1,000. Karena terbukti bersalah menyalah gunakan harta istrinya penggugat Lily Sofia Binti Ismail yang bekerja sebagai Assisten Administrasi Umum, tergugat yang tidak bekerja terpaksa menyalah gunakan harta istrinya untuk kepentingan pribadinya¹¹.

Dalam kasus diatas, bahwa Suhaimi Bin Abdullah, jelas bersalah karena telah lalai akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya bukan menyalah gunakan harta dari keringat istrinya, tergugat juga telah dijatuhi hukuman denda tidak lebih dari RM 1,000. Tergugat tidak membuat sebarang rayuan, dan tergugat juga mengakui kesalahannya tersebut didepan yang Arif (Hakim). Hakim memutuskan untuk tergugat Suhaimi Bin Abdullah agar memberikan cagaran nafkah yang selama ini dia abaikan kepada anak dan istrinya.

Ibnu Katsiir Rahimahullah mengatakan : *“yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian*

¹¹ *Analisis Dokumen*, Buku Daftar Kes Mahkamah Syariah W.P K.L No.Daftar:14002-058-0819-2010, Tgl 5-09-2011.

sesuai kemampuan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka”. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang sama terhadap mereka¹². Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹³

Juga dapat dilihat tentang tahap kesadaran masyarakat terhadap perlakuan yang termasuk kedalam kesalahan matrimoni (perkawinan). Dan dapat diketahui juga faktor-faktor berlakunya matrimoni dan juga sebab terjadinya kesalahan matrimoni, dan sejauh mana efek dari diberlakukannya Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 ini dalam menangani kasus tersebut dari terus-menerus terjadi di tengah-tengah masyarakat pada zaman sekarang ini.

Pembagian yang dibuat, didapati bahwa kesalahan matrimoni ditetapkan dalam bagian ke 9 iaitu penalti (kesalahan) mempunyai 11 seksyen bermula dari seksyen 123 sehingga 133 seksyen Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah

¹² Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsiir, Bab 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 619.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah Ayat: 228*, (Bandung : PT.Syaamil Cipta Media, 2006).

Persekutuan 1984¹⁴. Didalam AUKI Wilayah Persekutuan 1984 terdapat undang-undang yang mengatur tentang kesalahan-kesalahan Matrimoni, kasus yang penulis bahaskan disini adalah kasus menganiaya istri yang diatur oleh seksyen 127 AUKI Wilayah Persekutuan 1984 (Akta 303), bahwasanya “*Seseorang yang menganiaya istrinya atau menipu harta isterinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu* “.

Dalam Mazhab Hanafi, seorang perempuan diperbolehkan mengadukan halnya kepada hakim bila suaminya berlaku sewenang-sewenang terhadapnya. Maksudnya supaya hakim itu menyuruh suami itu berlaku baik terhadap istrinya, kemudian bila dipandang bahwa tindakan laki-laki itu sudah keterlaluan hingga patut mendapat hukuman dan pengajaran, maka hakim itu boleh memberinya hukuman edukatif yang setimpal, disamping tetap menyuruhnya memperbaiki kelakuannya dan jangan sewenang-sewenang lagi terhadap istrinya, namun sejauh itu wanita tersebut tetap belum bisa meminta cerai. Sedang dalam mazhab maliki, bila seorang wanita mengalami perlakuan yang demikian, maka ia berhak mengadukan halnya kepada hakim agar diceraikan saja dari suaminya. Yakni bila dipandang wanita itu tak mungkin hidup sejahtera dengan perlakuan suaminya yang seperti itu. Pendapat inilah rupanya yang dianut oleh undang-undang di mesir pada materinya yang ke enam¹⁵.

Hukum yang terpakai di Malaysia khususnya di Mahkamah Syari’ah Wilayah Persekutuan mengenai kesalahan matrimoni lebih kepada hukuman ta’zir atau penjara.

¹⁴ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984*, (Akta 303), Bagian IX (Penalti).

¹⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal,(Semarang: CV.Asy Syifa’ , 1986), hal 416, h. 418-419

Undang-undang keluarga Islam yang terpakai di negeri-negeri Malaysia pada masa ini adalah lebih lengkap dan menyeluruh dan berasaskan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Jika hendak di bandingkan dengan undang-undang Keluarga Islam di beberapa buah Negara islam lainnya, tidak jauh perbedaannya. Demi menegakkan keadilan seharusnya umat Islam perlu kepada undang-undang dan tidak di ragukan sama sekali bahwa umat Islam telah di karuniakan dengan undang-undang Islam yang syumul dan universal. Untuk merealisasikannya, maka di wujudkan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa umat Islam dan urusan yang berkaitan hal ehwal Islam, adapun Pengadilan yang ada di Malaysia di kenal sebagai Mahkamah syari'ah .

Di Wilayah Persekutuan terdapat peradilan Agama tempat untuk mengajukan permohonan yang bersangkutan dengan keperdataan dan memutuskan putusan peradilan, yaitu Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, yang berpandukan pada Akta Undang-undang Keluarga Islam wilayah persekutuan 1984.

Wilayah Persekutuan ini meliputi daerah Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, dan Negeri Selangor. Namun penulis memilih tempat penelitian di Mahkamah Persekutuan yang berada di ibu Negara Malaysia yaitu Kuala Lumpur.

Hal ini yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul tentang:“SANKSI HUKUM TERHADAP KESALAHAN *MATRIMONI* DI MAHKAMAH SYARI'AH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

(Studi Kasus: Menganiaya Istri Berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984)''.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi lingkup permasalahannya kepada sanksi hukum terhadap kesalahan matrimoni khusus terhadap kesalahan suami yang menganiaya istri di Mahkamah Syariah Wilayah persekutuan Kuala Lumpur berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, juga keberkesanan di berlakukannya Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dalam menangani kasus kesalahan matrimoni tersebut dari terus berlaku di tengah-tengah masyarakat sekarang ini.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengingat pembatasan masalah seperti yang dinyatakan sebelum ini, maka perumusan masalah disusun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan *Matrimoni*?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap kesalahan menganiaya istri di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?
3. Bagaimana tinjauan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 menurut perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan *Matrimoni*.
 - b. Untuk mengetahui sanksi Hukum terhadap kesalahan *Matrimoni* yang di khususkan terhadap suami menganiaya istri di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 - c. Untuk mengetahui keberkesanan di berlakukannya sanksi hukum terhadap kesalahan menganiaya istri bagi yang melanggarnya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam di wilayah Persekutuan 1984.
2. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :
- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan lebih memahami problematika seputar kasus kesalahan-kesalahan dalam *Matrimoni* dalam skop kajian menganiaya istri yang berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam di Wilayah Persekutuan 1984.
 - b. Sebagai Syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S1) dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universiti Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Dapat memperluas wawasan intelektual kepada umat islam, para pelaku akademik dibidang hukum, terutama tentang tinjauan terhadap kasus kesalahan-kesalahan *matrimoni* terhadap kesalahan menganiaya Isteri dan diberlakukannya Akta Undang-undang Keluarga Islam di Wilayah Persekutuan 1984 terhadap kasus tersebut..

- d. Dapat menambah wawasan ilmu dalam wilayah kajian dan sumbangan penulis terhadap pengetahuan umumnya yang erat kaitannya dengan program studi *Ahwal al-Syakhsiyyah* dan menambah literatur kepustakaan.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, untuk menyelesaikan dan menetapkan putusan yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara yang beragama Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah suami yang di hadapkan ke Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akibat one prestasi kepada pasangannya tersebut (yang melakukan kesalahan-kesalahan matrimony Menganiaya Istri).
- b. Objek dalam penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap kesalahan matrimoni menganiaya Isteri di Mahkamah Syariah Wilayah persekutuan Kuala Lumpur, serta sejauh mana keberkesanan di berlakukannya sanksi hukum tersebut berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 terhadap permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bercerai akibat kasus kesalahan matrimoni di Mahkamah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2009-2010 sebanyak 218 kasus. Pada tahun 2009 ada sebanyak 86 kasus, dan di tahun 2010 ada 132 kasus. Karena populasinya sebanyak 218 kasus maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 10% yaitu 21 kasus, sampel ini akan ditarik dengan menggunakan *Metode Random Sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a). Data Primer : yaitu data yang diperoleh dari responden yaitu 21 pasangan suami istri yang melaporkan ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terhadap kasus kesalahan Matrimoni yang berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan.
- b). Data Sekunder : yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, instansi-instansi terkait, hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Kitab-kitab Fikih serta buku-buku yang lain memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis beberapa menggunakan metode sebagai berikut :

- a). Observasi yaitu peninjauan langsung di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Bangunan Sulaiman, Jl.Damansara, 50676 K.L, Tlp.03-2273788, fax. 03-22734318
- b). Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada Suami Istri, Hakim, Pendaftar (Panitera), Penolong Pendaftar (Panitera Pembantu),
- c) Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus kesalahan matrimony menganiaya Istri berdasarkan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam. Penulis menerapkan metode analisa ini dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti¹⁶.

7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Agustus 2006) Cetakan XIII, h. 15

- a) Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b) Metode Deskriptif Analisis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan, yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas gambaran umum latar belakang Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berisi tentang sejarah berdirinya Mahkamah Syari'ah, lokasi, Visi dan Misi, Fungsi Jabatan Kehakiman Syari'ah Wilayah Persekutuan, pelaksanaan pengadilan di Mahkamah, Peranan Mahkamah Syari'ah dan Struktur Organisasi.

BAB III: Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang teori matrimoni terhadap kesalahan menganiaya istri dan sanksi hukum bagi yang melanggarnya, yaitu pengertian dan dasar hukum , jenis-jenis

kesalahan *matrimoni* dalam Islam, pandangan dari para Ahli dan Statistik Kasus kesalahan *Matrimoni*.

BAB IV: Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan *Matrimoni* Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Studi Kasus : Menganiaya istri berdasarkan Akta undang-undang Keluarga Islam wilayah Persekutuan 1984). Bentuk-bentuk Kesalahan *matrimoni*, sanksi Hukum terhadap kesalahan *matrimoni* yaitu menganiaya istri di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, tinjauan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan, Kritik dan Saran

BAB II

GAMBARAN MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Syariah

Pada tahun 1948, ordinan Mahkamah Persekutuan dan sistem kehakiman persekutuan memisahkan Mahkamah Syariah dari *hirarki* Mahkamah. Pada masa pemerintahan kuasa asing, segala urusan agama diberi kuasa kepada raja-raja Melayu tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti perkawinan, adat istiadat, dan agama. Pada tahun 1952, Negeri Selangor Dahrul Ehsan yang pertama sekali mewujudkan Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syarak, kemudian diikuti oleh Negeri-negeri lain di Malaysia Barat¹.

Meskipun undang-undang ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tidak banyak perubahan yang bermakna. Undang-undang ini terus menerus dipakai sampai kemudian terjadi perubahan yang digunakan pada awal tahun 80-an dan berlanjutan sampai dengan tahun 90-an². Sultan merupakan Ketua Perlembagaan Negeri di Negeri Bagian masing-masing di atas Menteri Besar (Gubernur). Di bawah Perlembagaan Negeri, kuasa perundangan dipunyai oleh Dewan Undangan yang melantik ahli Dewan untuk membentuk Majelis Mesyuarat Kerajaan(EXCO/Anggota) kabinet³. Exco tersebut yang diketuai oleh

¹ Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, (Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010).

² Rafiah Salim, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 35

³ EXCO adalah Majelis Eksekutif Negeri yang mempunyai tanggungjawab untuk menasehati Raja atau Yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan tugas eksekutif mereka.

Menteri Besar (Gubernur), memegang kuasa eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri. Menteri Besar yang dilantik oleh Sultan adalah daripada partai politik yang memenangkan kursi yang terbanyak di dalam Dewan Undangan (DPRD) hasil Pemilihan Umum (PEMILU)⁴. Maka Sultan bagi setiap negeri di Malaysia dilantik sebagai Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam. Manakala bagi negeri yang tidak mempunyai institusi beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah dan Sabah, Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam ialah Yang Di Pertuan Agung. Kebanyakan negeri menjadikan Gedung DPRD sebagai institusi yang tertinggi (pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama & Istiadat, Jabatan Mufti (MUI), Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam.

Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Kadi bagi menjalankan peraturan dan penetapan Undang-undang Administrasi Agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap Negeri di dirikan sebuah Jabatan Agama Islam untuk mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang di bawah ketetapan Administrasi agama Islam. Mahkamah Syariah adalah satu badan penting yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam pada setiap negeri. Mahkamah Syariah juga di dirikan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan Administrasi agama Islam. Ketua bagi setiap daerah berkenaan dilantik seorang Kadi Daerah⁵.

⁴“Sejarah, Geografi, Penduduk Malaysia”. Diakses pada 4 September 2011 dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia_files/ads_002/Kuala_Lumpur.html

18. *Ibid*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010.

Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berasingan dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran (Wewenang) dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan Zakat, Baitulmal, Dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri tersebut di Malaysia. Pada masa kini semua Mahkamah Syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitاسnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri.

Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di dirikan setelah satu perjanjian pembangunan dibuat di antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri Selangor pada 1 Februari 1974. Sehubungan dengan pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) pada ketika itu yang dinamakan sebagai Mahkamah Kadi Besar dan Mahkamah Kadi, juga Jawatankuasa Ulangbicara telah di dirikan dan dilantik berdasarkan kehendak penetapan di bawah seksyen 44(1)(2) dan seksyen 46(2) Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Selangor (1952) sebagaimana yang telah diubahsuai oleh Perintah Wilayah Persekutuan. Bangunan Sulaiman dan kawasannya telah ditetapkan dan disahkan sebagai Mahkamah Syariah dalam ketetapan kerajaan P.U. (B) 702.

Semenjak di dirikan, MSWP telah diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mulai bulan Januari 1992, MSWP telah dipisahkan daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan dijadikan sebagai satu bagian di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Pada 15 Oktober 1993, Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 telah dikuatkuasakan. Daripada itu, hirarki Mahkamah telah bertukar daripada Mahkamah Kadi kepada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Kadi Besar kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan Jawatankuasa Ulangbicara kepada Mahkamah Rayuan Syariah. Perubahan tersebut berdasarkan peruntukan seksyen 40(1)(2) dan (3) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993.

Bangunan MSWP yang pertama ditempatkan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, kemudian berpindah ke Bangunan JKR, Jalan Tun Abdul Razak dan pada tahun 1983 berpindah ke Bangunan Baitulmal, Tingkat 4 dan 5, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Pada bulan September, 1990 ditempatkan di Bangunan Sulaiman, Jalan Damansara, 50676 Kuala Lumpur.

B. Visi dan Misi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Wilayah Persekutuan

Adapun Misi Jabatan Kehakiman Syariah Wilayah Persekutuan adalah: Mendengar kes mal, jenayah dan faraid dalam kewenangan, juga melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan dukungan secara professional, berkesan dan sistematik berasaskan ketetapan Undang-Undang Islam yang seragam untuk mencapai keredhaan Allah.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah:

Menjadikan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sebuah agensi yang berwibawa dalam melaksanakan perundangan islam demi menegakkan keadilan.

Adapun objektif Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan adalah:

1. Menyegerakan pengendalian kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan berkesan

2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan.
3. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran.
4. Melaksanakan Sistem Keadilan Islam Yang Adil dan Cekap Berlandaskan Hukum Syara' dan Undang-Undang Negara Yang digubal.
5. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi⁶.

Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Wilayah Persekutuan adalah:

1. Menguruskan permohonan pendaftaran kasus-kasus syariah iaitu kes Mal, Jenayah dan Faraid.
2. Menguruskan perbicaraan sidang kasus syariah iaitu kasus Mal, Jenayah dan Faraid.
3. Menerima mendengar dan memutuskan kasus-kasus rayuan syariah maal dan jenayah secara teratur dan berkesan.
4. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan pembagian harta atau faraidh.
5. Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.

Begitu juga dengan tujuan dan peranan Jabatan Kehakiman adalah:

1. Mengekalkan perundangan Islam yang ditetapkan kepada mahkamah ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah s.w.t berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

⁶ Jabatan Kehakiman Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Wilayah Persekutuan*, (Kuala Lumpur:1992), h. 3

2. Menjalankan Administrasi agama Islam al-Quran dan As-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam daripada pepecahan dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasehat serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberi bimbingan dan nasehat konseling kepada pasangan yang ingin berumahtangga agar dapat membina rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat membuat rayuan daripada pihak istri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kawin, penceraian, talak, fasakh, dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain perkara mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan.
12. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah sepanjang masa.

13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka⁷.

C. PELAKSANAAN PENGADILAN DI MAHKAMAH SYARIAH

Cara pelaksanaan di Mahkamah Syariah ada tiga cara, antaranya adalah Mahkamah Rendah Syariah pelaksanaannya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang ditetapkan oleh enakmen negeri.
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah
4. Membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah⁸.

Selain daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga mempunyai cara pelaksanaannya tersendiri, antaranya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang ditetapkan kepadanya
2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus sivil dan jenayah
3. Menyelesaikan dan mengesahkan kasus-kasus faraid
4. Menguruskan kasus-kasus rayuan
5. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (bagi sesetengah negeri)⁹.

Yang ketiga adalah Mahkamah Rayuan Syariah dengan pelaksanaannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan
2. Mempunyai kuasa pembatalan setiap tuntutan hukuman oleh Mahkamah Syariah

²³. Ensiklopedia Bebas, *Op.cit* 15 Dec 2010.

⁸ Jabatan Kehakiman Wilayah Persekutuan, *Op.cit*, h. 3

⁹ *Ibid.* h. 4

3. Mengurangkan hukuman
4. Memerintah supaya diadakan sidang kembali atau ulang bicara.
5. Menerima rayuan tertuduh yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM25.00 dan telah membuat rayuan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
6. Setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga orang panel (hakim) rayuan daripada Panel (hakim) Rayuan Syariah yang dilantik dan ditauliahi/izin oleh KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Pengerusi Panel Rayuan Syariah) Keputusan mahkamah adalah muktamad dan sah¹⁰.

Prestasi Mahkamah Syariah Menurut Ahmad Zahid Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sebanyak 90% kasus-kasus melibatkan Mahkamah Syariah berjaya diselesaikan dalam tempoh 12 bulan, sekaligus melenyapkan tuduhan pihak tertentu terhadap institusi itu yang dikatakan lewat menyelesaikan sesuatu kasus dan sering tertunda¹¹.

D. Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah

Secara umumnya Mahkamah Syariah sesuatu negeri di Malaysia adalah berwenang hanya di dalam negeri tersebut sahaja. Ini adalah kerana dasar pendirian Mahkamah Syariah adalah di dalam wewenang negeri dan ianya terbatas kepada undang-undang diri orang-orang Islam sahaja. Hal ini jelas diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Senarai 2 Butiran 1. Bagi Wilayah Persekutuan juga, berdirinya Mahkamah Syariah adalah seiring dengan penubuhan Wilayah Persekutuan pada 1.2.1974 melalui Enakmen

¹⁰ . *Ibid*, h. 5

¹¹ Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, (Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010).

Pentadbiran/Administrasi Hukum Syarak Selangor 1952 (perintah-perintah Wilayah Persekutuan 1974) 1993 (Akta 505) disahkan pada 1993, maka Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan juga di dirikan mengikut kehendak akta tersebut.

Dalam Seksyen 40(1) akta tersebut, telah di ditetapkan bahawa Yang Di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Menteri, melalui pemberitahuan dalam penetapan mendirikan Mahkamah-Mahkamah Rendah Syariah bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan di tempat-tempat yang difikirkan. Dalam Seksyen 40(2) akta yang sama pula, ditetapkan bahawa Yang Di-Pertuan Agong boleh atas nasihat Menteri, melalui pemberitahuan dalam penetapan mendirikan Mahkamah Tinggi Syariah bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan. adapun dalam Seksyen 40(3) pula, diperuntukkan bahawa Yang Di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Menteri, melalui pemberitahuan dalam penetapan mendirikan suatu Mahkamah Rayuan Syariah bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Prosedur kes Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan:

Aktivitas utama Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan adalah mendengar, membicarakan, dan memutuskan kasus-kasus yang telah didaftarkan.

Aktifitas tersebut terbagi kepada tiga peringkat kasus, yaitu :

1. Kasus Mal (kasus tentang kekeluargaan : perkawinan, pendaftaran perkawinan, dll)

a) Pendaftaran Kes

- Urusan pendaftaran kes boleh dijalankan serta merta

b) Proses sebutan pertama

- Tempoh sebutan pertama dalam tempoh 21 hari selepas pendaftaran kes

c) Keputusan perbicaraan

- Akan dikeluarkan dalam jangka waktu 2 minggu selepas selesai proses perbicaraan

2. Kasus Jenayah

a) Pendaftaran kes

- Tindakan serta merta setelah kertas pertuduhan diserahkan oleh pendakwa syar'i jabatan agama islam wilayah persekutuan

b) Proses panggilan dan perbicaraan

- Akan dipanggil dalam jangka waktu 21 hari

c) Duit jaminan (Deposit)

- Akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan

3. Kasus Faraidh (Kasus tentang pembagian harta warisan dan wasiat)

a) Pendaftaran permohonan

- Dijalankan serta merta

b) Keputusan permohonan

- Perintah pembagian dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas selesai pembagian

Istilah '*mal*' sebenarnya merujuk kepada harta tetapi dalam konteks perundangan di Malaysia, ia merujuk kepada kasus-kasus bukan jenayah. Bidang kuasa mal bagi Mahkamah Syariah terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal (pemastautin) di negeri-negeri di Malaysia. Dan sebenarnya, Mahkamah Syariah

mempunyai bidang kuasa mal yang hampir menyeluruh dan merangkum banyak aspek kekeluargaan Islam termasuklah urusan-urusan sebagai berikut¹² :

1. Berkaitan dengan isu-isu sebelum perkawinan¹³.
2. Berkaitan dengan persoalan yang timbul semasa perkawinan¹⁴.
3. Berkaitan dengan persoalan pembubaran perkawinan¹⁵.
4. Isu-isu yang timbul/berbangkit selepas perceraian¹⁶.
5. Permohonan penguatkuasaan perintah mahkamah¹⁷.
6. Sebarang permohonan di dalam sesuatu kasus sedang berjalan (*interlocutory order*).
7. Permohonan-permohonan mengenai wasiat, wakaf dan harta pusaka.

4. Kasus Tuntutan/Kes Saman (Gugatan)

Kasus Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau *prosiding* kasus *mal* yang dimulai dengan denda beserta pernyataan tuntutan. Setiap pernyataan tuntutan

¹² Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Di akses pada 25 september 2011. http://www.esyariah.gov.my/portal/page?_pageid=185,79126&_dad=portal2&_schema=PORTAL2

¹³ Seperti putus tunang, permohonan kebenaran untuk berkahwin dan permohonan poligami.

¹⁴ Seperti permohonan mengesahkan perkahwinan, permohonan membatalkan perkawinan yang tidak sah, permohonan nafkah diri, nafkah anak, mensabitkan isteri nusyuz, permohonan isteri supaya suami hidup bersama semula dan sebagainya.

¹⁵ Permohonan cerai khulu', li'an, fasakh, talak, ta'liq, perceraian dengan perintah, karena murtad dan juga secara anggapan mati.

¹⁶ Perkara-perkara ini boleh dirujuk di mahkamah yang ada bidangnya, yaitu selepas perceraian berlaku. Umpamanya, sugu hati (muta'ah) selepas perceraian, harta sepencarian, nafkah iddah, nafkah anak, nafkah tertunggak dan juga soal hadhanah (penjagaan anak).

¹⁷ Ini berlaku apabila keputusan yang dikeluarkan tidak diikuti oleh pihak yang kena tanggungan. Maka, pihak-pihak yang satu lagi boleh menuntut supaya perintah-perintah yang dikeluarkan itu dikuatkuasakan oleh pihak mahkamah.

boleh dikenakan bayaran (*fee*) sejumlah RM 50¹⁸. Dalam kaitan dengan permasalahan yang dikaji kasus wali enggan atau engkar termasuk dalam kategori kasus berbentuk tuntutan.

5. Kasus Permohonan

Kasus Permohonan ialah tiap-tiap tindakan atau *prosiding* kasus *mal* yang dimulakan dengan *notis permohonan* beserta *afidavit*¹⁹ *sokongan*. Notis permohonan hendaklah memuat fakta yang cukup terperinci untuk menjayakan suatu permohonan dan hendaklah disokong dengan afidavit yang diikrarkan (sumpah dihadapan Hakim Syarie atau Pendaftar). Setiap pendaftaran permohonan dikenakan bayaran sejumlah RM 2 dan tambahan RM1 bagi setiap ekshibit²⁰. Di sini, kasus pengesahan atau perintah nikah dan kasus permohonan wali hakim atau wali am termasuk dalam kategori kasus berbentuk permohonan.

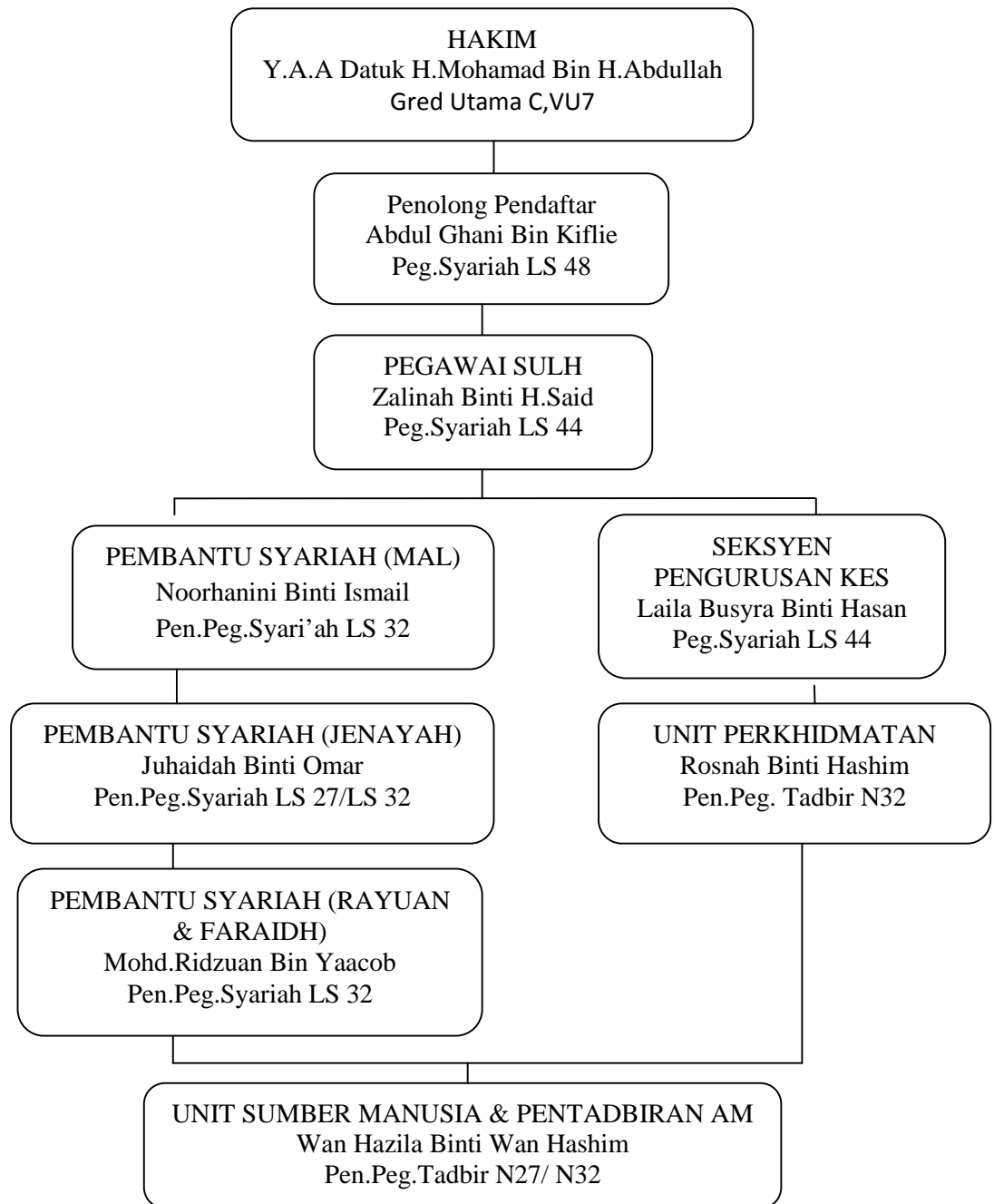
¹⁸ RM 50 bersamaan dengan Rp 145,000. (pertukaran bulan oktober 2011- Rp 2.860 Bersamaan Rm 1 Ringgit Malaysia) “Fee” adalah bayaran pemfailan suatu saman/permohonan di mahkamah sebagaimana yang telah ditetapkan dan dikehendaki dibayar pada waktu saman/permohonan difailkan. Di Indonesia, “fee” dikenal sebagai biaya perkara.

¹⁹ Afidavit adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai suatu fakta dan hendaklah dibuat dengan sumpah di hadapan Hakim Syarie atau Pendaftar Mahkamah Syariah.

²⁰ Ekshibit adalah dokumen dan sebagainya yang diserahkan bersama permohonan ke pengadilan bagi menjelaskan suatu fakta yang ditimbulkan atau menyokong keterangan para pihak dalam proses berperkara. RM 2 bersamaan dengan Rp 6,800 dan setiap eksibit dikenakan bayaran tambahan kira-kira Rp 2,860 yang senilai dengan RM 1.

Tabel 1

**STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**



(Dokumen : *Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan*: Kuala Lumpur, 2010)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

KESALAHAN *MATRIMONI*

A. Pengertian *Matrimoni*

Matrimoni adalah berasal dari bahasa Inggris “*Matrimony*” yang sama artinya dengan *Marriage*¹. Di dalam bahasa Arab pula الجمع bermaksud berkumpul atau berhimpun. Manakala menurut istilah hukum yang bermaksud akad dengan menggunakan perkataan *Nikah* (النكاح), *Tajwiz* (تزويج) mengharuskan persetubuhan². Menurut istilah Hukum islam, terdapat beberapa definisi :

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة
بلرجل

*Artinya: “perkawinan menurut syara’ yaitu akad nikah yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dan laki-laki”*³

Kebolehan hukum dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja kebolehan hubungan seksual tetapi juga

¹A.S Hornby , Oxford advanced Learner’s Dictionary, Fifth Edition,(Oxford University Press, 1995), h. 723

² Sheikh Muhammad As-Sharbini Al-Khatib, *Mughi Al-Muhtaj*, Juz 3, (Mesir: Matbaah Mustafa Al-Hilbi, 1958), h .123

³ Abd.Rahman Ghazaly,M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana group, 2006) Cetakan Ke 2, h. 8

dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Melangsungkan perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yaitu mendapat hak dan kewajiban suami istri serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan redho Allah swt. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : ” Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ” ⁴.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat ni membatasi poligami sampai empat orang saja.

Manakala didalam kitab “Iqna “ Al-Mawardi mengatakan perkawinan sebagai akad yang mengharuskan persetubuhan⁵. atau mengikut definisi yang diberikan oleh badran yaitu sebagai satu akad yang diletakan oleh hukum syarak. Dimana ia

⁴ Departemen Agama R.I, Q2.S An-Nisa', ayat 3.

⁵ Sheikh Muhammad As-Sharbini Al-Khatib, *Iqna'*, Juz Al-Awal, (Singapura: Maktabah wa Matbaah Sulaiman Far'ie), h. 63

menghalalkan persetubuhan diantara suami isteri mengikut apa yang di syariatkan dan di hajati⁶.

Tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya tentang faedah perkawinan tujuannya adalah untuk melangsungkan keturunan, memenuhi hajat syahwat manusia, memelihara diri, untuk menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab, membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta kasih.

Hikmah perkawinan antara lain dapat menyalurkan naluri seksual, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras dan bertanggung jawab, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri.⁷

Dalam kamus undang-undang dinyatakan bahwa “*Matrimoni*” bermakna gerbang perkawinan dan “*matrimonial proceeding*” bermaksud Prosiding Hal Ehwal Suami Isteri (Prosedur tingkah laku suami istri)⁸. Adapun dalam istilah Islam adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة
بلرجل

⁶ Badran Abu Al-Aynayn, *Az-Zawaj Wa al-Talaq Fi al-Islam, Fiqh Muqarin bayna Al-mazhab Al-arbaah Al-Sunniyah wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qanun*, (Al-Iskandariyah : Muassasat Shahab Al-Jamiah, 1967), h. 9

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 72

⁸ Salleh Buang Nasser Hamid dan Maimoonah Hamid, *kamus Istilah Undang-undang English – Malaya*, (Central Law Book Corporation Sdn Bhd, 1995), h. 10

Artinya: “perkawinan menurut syara’ yaitu akad nikah yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dan laki-laki”⁹

Maksud dari prosiding hal ehwal suami Istri adalah masalah perkawinan yang terdaftar mengikut prosedur undang-undang Negara, seperti akad nikah, cerai, rujuk, nafkah, hak penjagaan, faraidh, maal.

Kesimpulannya dapatlah dikatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan diantara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan melahirkan hak serta kewajiban diantara kedua mereka¹⁰.

B. Jenis-jenis Kesalahan Matrimoni dalam Islam :

Untuk lebih terperinci penulis akan menguraikan tentang definisi kesalahan-kesalahan matrimony dalam islam dan pandangan dari para ahli.

1. Kesalahan Suami

a) Tidak memberi nafkah

Asal makna nafkah ialah mengeluarkan atau menghabiskan. Manakala nafkah dari segi istilah ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian¹¹. Memberi nafkah kepada istri adalah suatu kewajiban. Dalil yang menunjukan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah seperti dalam firman Allah swt dalam surat An-Nisa, ayat 34:

⁹ Abd.Rahman Ghazaly,M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana group, 2006) Cetakan Ke 2, h. 8

¹⁰ Mat Saad Abd Rahman ,*Undang-undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa*, (Kuala Lumpur: Hizbi Sdn Bhd, 1993), h. 17

¹¹ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi’I*, (Pustaka salam Sdn Bhd), h. 731

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa' :34)¹²

Sehubungan dengan ini, Ibnu Qudamah menyebut bahwa hukum ini telah disepakati ulama. Daripada kenyataan tersebut tidak dapat dinafikan kewajiban keatas suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika suami enggan melaksanakan tanggung jawab untuk memberi nafkah terhadap istrinya maka ia telah melakukan kesalahan.

Nafkah yang mesti diberikan kepada istri mempunyai kadar tertentu. Walau bagaimanapun jumlah dan jenisnya berbeda berdasarkan kemampuan suami. Kedudukan istri (kaya, miskin, berketurunan) tidak mempengaruhi kadar tersebut. Ini karena faktor yang diambil kira adalah kemampuan. Faktor ini merujuk kepada pemberi nafkah dan bukannya kepada penerima nafkah.¹³

¹² DEPAG RI, Al-qur'an dan Terjemahan, Surat An-Nisa' Ayat: 34

¹³ *Op-cit*, h. 744

b) Memudaratkan Istri

Islam menyarankan agar pasangan suami istri hidup dalam harmonis dan saling sayang menyayangi. Istri berhak untuk mendapatkan layanan baik daripada suaminya. Suami sebagai pemimpin keluarga seharusnya melindungi istri tanpa kekerasan yang boleh memudaratkan istrinya sendiri.

Mengenai persoalan ini, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa adalah menjadi kewajiban suami terhadap istrinya untuk bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, menghormatinya, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan bagi melunakkan hatinya dan bersabar dengan sikapnya yang kurang menyenangkan¹⁴.

Sehubungan dengan perkara diatas, terdapat nash Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban untuk bersikap makruf terhadap istri. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa, ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(QS. An-Nisa' :34)¹⁵.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2,(Dar Al-Kitab Al-Arabi), h.170

¹⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS.An-Nisa' :19

Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud:

خيركم خيركم لأهله و انا خيركم لأهلي ما اكرم النساء إلا كريم فلا أها نهن إلا لنيم

*“Sebaik-baik kamu ialah yang berbuat baik terhadap keluarga kamu.,
sesungguhnya aku berbuat baik terhadap keluargaku”¹⁶.*

Difahami dari dalil-dalil diatas bahwa suami tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan istrinya. Contohnya seperti : memukul, menampar, menumbuk, mengeluarkan kata-kata kasar, dan sebagainya.

Rasulullah SAW mencela orang yang memukul istri, sebagaimana sabdanya yang bermaksud:

*“ Janganlah kamu memukul istri kamu seperti memukul hamba sahaya
dan kemudian dimalam harinya dia disetubuhi”.*¹⁷

c) Enggan bersetubuh dengan isteri (Ila’)

Seorang suami dikatakan telah melakukan kesalahan sekiranya dia enggan bersetubuh dengan istrinya karena dengan sikapnya yang demikian boleh menyebabkan istri mengalami siksaan bathin, ini berlawanan dengan tujuan asal perkawinan.

Suami yang besumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya atau yang dipanggil sebagai Ila’ adalah suatu tindakan yang diharamkan Allah swt.

¹⁶ Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim , *Shahih Bukhari, Juz 7*, (Beirut: Al-Haiah Lil ‘Ammah Lil Kitab), h. 43

¹⁷ *Ibid*, h. 44

Hukum Ila'

Terdapat beberapa hukum syari'at islam berkaitan dengan Ila': hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami bermula dari hari dia bersumpah, ini akan memberi peluang kepada suami untuk meraiik balik sumpahnya dan membayar kafarah sumpah, atau menceraikan istrinya jika dia tidak mau rujuk dan tidak mau membayar kafarah sumpah.

Jika tempoh 4 bulan tadi telah tamat, dan suami tetap dengan sumpahnya, beliau telah memudaratkan istrinya. Ketika itu berdasarkan tuntutan istri, Hakim berhak mengambil salah satu tindakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memaksa suami menarik balik sumpahnya dan kembali semula kepada istrinya serta membayar kafarah sumpah jika dia bersumpah dengan nama Allah/ bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Jika dia bersumpah untuk melaksanakan sesuatu/ bersedekah dengan sesuatu, dia hendaklah melakukan.
- 2) Memaksa suami menceraikan istrinya jika dia enggan menarik balik sumpahnya dan tetap berpegang dengan sumpahnya¹⁸.

Istri berhak mendapatkan nafkah bathin didalam perkawinan. Dalam menguraikan kewajiban suami menyetubuhi istri, Ibnu Hazm berpendapat suami wajib menyetubuhinya sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. Manakala Imam Syafi'ie berpendapat tidak wajib karena bersetubuh itu hak suami. Dimana suami tidak wajib menggunakan haknya ini sepertimana hak-haknya yang lain.

¹⁸ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Pustaka salam Sdn Bhd), h. 706-707

Manakala Imam Ahmad pula berpendapat suami wajib menggauli istrinya sekali dalam tempoh 4 bulan¹⁹.

d) Tidak berlaku adil terhadap istri

Islam membenarkan umatnya berpoligami atau beristri lebih dari pada seorang. Walaupun dihalalkan tetapi ia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Ini bermakna tidak semua orang berkelayakan untuk berpoligami. Sebaliknya jika seseorang itu berkeinginan untuk berpoligami, seorang suami seharusnya menimbang beberapa perkara-perkara dan mengukur kemampuannya. Jika tidak, keputusannya untuk berpoligami akan mendatangkan berbagai masalah dan menyusahkan semua pihak seandainya berpoligami ini dipandang ringan.

Firman Allah swt yang menghalalkan poligami disebut dalam surat An-Nisa ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa':3)²⁰.

Dari ayat diatas jelas menunjukkan berlaku adil adalah syarat utama dalam berpoligami. Adil yang dimaksudkan disini adalah kemampuan suami

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, (Dar Al-Kitab Al-Arabi), h.188

²⁰ DEPAG R.I, *op.cit*, Q.S An-Nisa':3.

memberikan persamaan hak kepada para Istri-istrinya. Mengikut Abu Zuhrah, persamaan itu adalah pada giliran bermalam dan nafkah yang terangkum didalamnya tempat tinggal, makanan, dan pakaian.

Begitu juga dengan bilangan persetubuhan, dimana suami wajib menyamaratakannya. Hak melakukan persetubuhan adalah hak suami. Walau bagaimanapun suami wajib menunaikannya jika diminta oleh isteri dan tidak berada dalam uzur²¹.

Rasulullah saw telah berusaha sedaya upaya untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya, sabda Rasulullah saw yang bermaksud:

“Wahai Tuhanku, inilah pembagianku menurut apa yang ku miliki (dalam kesungguhanku), maka janganlah engkau mencelaku terhadap perkara yang engkau miliki dan aku tidak miliki (tidak berkuasa)”²².

2. Kesalahan Istri

Istri juga dikatakan telah membuat kesalahan matrimony apabila bertindak seperti ingkar pada perintah suami, enggan bersetubuh, keluar rumah tanpa izin suami dan sebagainya. Semuanya ini terangkum dalam pengertian Nusyuz.

a) Istri yang Nusyuz

Seorang istri yang baik ialah yang taat setia pada suaminya. Ketaatan istri pada suaminya adalah dituntut oleh syari'at islam. Sabda Nabi saw dalam menggambarkan istri yang baik adalah :

²¹ Sheikh Muhammad As-Sharbini Al-Khatib, *Iqna'*, Juz Al-Awal, (Singapura: Maktabah wa Matbaah Sulaiman Far'ie), .140

²² Muhammad Bin Ali Bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Author*, juz 5, (Maktabah wa Matbaah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu), h.244

“sebaik-baik perempuan ialah apabila kamu memandangnya membahagiakan kamu, apabila kamu menyuruhnya dia akan mematuhi kamu dan apabila kamu keluar (tiada disisinya) dia akan memelihara harta kamu dan dirinya sendiri”²³.

Dengan ini wajib keatas istri untuk mematuhi dan mentaati suaminya sendiri. Kegagalan istri untuk mematuhi dinamakan Nusyuz ataupun durhaka. Syeikh daud Al-Fatani menyatakan bahwa istri nusyuz ialah istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, melarang suami dari mengambil apa yang disukainya dari istrinya, memohon talak dan lain-lain

Ketaatan istri pada suaminya digambarkan sepenuhnya oleh Rasulullah saw dalam sabdanya: kalau aku dibolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang lain, tentu aku suruh seseorang istri itu sujud kepada suaminya²⁴. Seorang istri diharuskan untuk taat dan menghormati suaminya, karena syurganya seorang istri berada pada suaminya, maksudnya istri yang durhaka kepada suaminya tidak dapat mencium baunya syurga.

C. Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan *Matrimony* Dari Perspektif Hukum Islam

Dalam syariat Islam mereka yang melakukan kesalahan matrimoni akan dikenakan hukuman. Walaupun hukumannya tidak semuanya diterangkan dengan jelas. Hanya setengah hukuman saja yang telah ditentukan bentuk hukumannya melalui Al-Qur'an dan Hadist.

1. Kesalahan Suami

a) Tidak memberi nafkah

²³ Jalaluddin As-Sayuti, *Al-kutub As-Sittah Sunan An-Nasa'I*, Juz 6, (Cagri Yayin Lari, 1981), h. 68

²⁴ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad as-Syaukan, *op.cit*, h. 233-234

Suami yang enggan menunaikan tanggung jawabnya member nafkah kepada istrinya boleh dikenakan hukuman. Namun bentuk hukumannya berbeda antara kaya dan miskin. Jika seorang suami yang kaya dan mampu memberi nafkah kepada istrinya, tetapi gagal berbuat demikian, maka istrinya dibolehkan mengambil harta suaminya. Ini berdasarkan kisah Hindun Binti Uthbah : Hindun, istri Abu Sufyan telah mengadu kepada Rasulullah saw bahwa suaminya Abu Sufyan tidak memberi nafkah yang cukup kepadanya dan anak-anaknya. Lalu Rasulullah saw memerintah Hindun mengambil harta Abu Sufyan untuk nafkahnya dan anak-anaknya dengan sebaiknya²⁵.

Namun jika sekiranya istri tersebut tidak mampu untuk mengambil harta suaminya, maka dia boleh mendapatkan haknya melalui Hakim dan Mahkamah.²⁶

Bagi memperjelas lagi keadaan ini, Mahyuddin Abdul Hamid di dalam kitabnya berkata, sekiranya suami enggan memberi nafkah setelah diperintah oleh kadi/Hakim, maka dalam keadaan ini Hakim perlu melihat jenis harta yang dimiliki suami tersebut. Jenis-jenis harta sama ada harta nyata, kadi boleh menjual harta tersebut dan menguruskan nafkah istri tersebut, walau bagaimanapun hendaklah ditinggalkan sebagiannya untuk kegunaan suami²⁷.

Tetapi bagi suami yang tidak mempunyai harta yang tidak nyata untuk dijual, isteri boleh meminta haknya melaui Hakim atau Kadi. Jika suami masih enggan memberikannya setelah diberi tiga kali nasihat, hukuman penjara boleh

²⁵ As-San'ani, Subul Al-Salam Syarah Bulughul Maram, Juz 4, h. 1160

²⁶ Sheikh Muhammad As-Sharbani Al-Khatib, *Mughi Al-Muhtaj*, Juz 3, (Mesir: Matbaah Mustafa Al-Hilbi, 1958), h. 440

²⁷ Mahyuddin Abdul Hamid, *Ahwal Al-Syakhasiah*, Cetakan 3, (Mesir: as-Saadah), h. 207

dikenakan keatasnya. Jika selepas hukuman penjara suami masih lagi enggan, istri boleh meminta fasakh²⁸.

b) Menzalimi istri

Perbuatan yang termasuk didalam kesalahan memudaratkan istri adalah seperti memukul, melukakan, menampar, dan sebagainya. Untuk kesalahan ini, Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa hukumannya adalah Qishas²⁹.

Manakala menurut Imam Malik pula hukumannya Qishas dan Ta'zir.³⁰ Hukuman asal jenayah memukul dan mencederakan dengan sengaja ialah qishas, manakala diyat dan ta'zir adalah hukuman alternative kepada hukuman qishas. Para Fuqaha Islam telah mendefinisikan jenayah memukul dan mencederakan sebagai setiap perbuatan jahat oleh seseorang ke atas orang lain yang tidak membawa kepada kematian³¹.

Dalil yang mereka gunakan adalah sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka

²⁸ *Ibid*, h. 218

²⁹ Alauddin Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *bada'i As-Sana'I fi Tartib as-Syar'ie*, Juz 7, (Qahirah), h. 234

³⁰ Muhammad Ibn Abdul rahman Al-hattab, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz 6, (Qaherah), h. 270

³¹ Audah, Abdul-Qadir, *At-Tasyri' al Jina'i al-Islami*, Edisi 5, (Qahirah:1969), h.204

(pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Q.S Al-Maidah:45)³².

Bagi hukuman ta'zir pula, tergantung kepada kebijakan pemerintah untuk mengenakan hukuman yang difikirkannya sesuai dan setimpal dengan perbuatannya yang dilakukannya³³.

c) Enggan bersetubuh

Enggan bersetubuh dengan istri secara bersumpah adalah suatu perbuatan yang tidak wajar dilakukan. Oleh itu sangat sesuai mereka ini dikenakan hukuman. Allah telah meletakkan tempoh 4 bulan kepada suami yang bersumpah karena enggan bersetubuh dengan istrinya. Firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat:226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah :226)³⁴

Sekiranya dalam jangka waktu 4 bulan itu suami telah menyetubuhi istrinya, maka secara tidak langsung Ila' itu akan gugur. Walau demikian, suami yang bersumpah tadi wajib membayar kafarah³⁵. Jenis-jenis kafarah atau denda

³² DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-maidah, ayat 45.*

³³ Paizah Hj Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Imtyaz Sdn.Bhd, 1990), h. 158

³⁴ DEPAG RI, *op.cit, Surat Al-Baqarah, ayat 226*

³⁵ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh ala al-Mazahib Arba'ah, Juz 4*, (Beirut: Ahya At-Tarmidzi al-Arabi). h.481

yang diwajibkan oleh syariat islam sebagai hukuman adalah: memerdekakan hamba sahaya, memberi makan kepada fakir miskin dan juga berpuasa.

Tetapi jika dalam jangka waktu 4 bulan itu berlalu, tetapi suami enggan juga menyetubuhi istrinya, maka istri tersebut berhak diceraikan. Pendapat ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Walau bagaimanapun sekiranya keduanya tuntutan isteri itu ditolak, Imam Malik berpendapat Hakim boleh menceraikan mereka walaupun dengan jalan paksa atau penjara³⁶.

d) Tidak berlaku adil

Tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bentuk hukuman yang boleh dikenakan keatas mereka yang gagal berlaku adil dalam berpoligami. Imam Hanafi berpendapat seorang istri boleh mengadu kepada kadi dan meminta agar suaminya dikenakan hukuman ta'zir. Jika sabit kesalahannya boleh diberi teguran kepadanya. Walau bagaimanapun kadi tidak boleh menceraikan mereka tetapi boleh mengenakan hukuman ta'zir³⁷.

2. Kesalahan Istri

a) Istri Nusyuz

Sangat berdosa besar jika seorang istri tidak taat kepada suaminya. Wajib seorang istri untuk taat kepada suaminya dan menghambakan diri untuk suaminya bagi mendapatkan keredhaan Allah swt. Dalam Firman Allah swt surat An-Nisa ayat 34:

³⁶ *Ibid*, h. 104

³⁷ Shamsuddi Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Zahabi, *Al-Mustadrik ala Sahibaini fi al-Hadis, Juz 2*, (Beirut:Dar al Fakir, 1978), h. 186

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ ۚ فَعُظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٨﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S An-Nisa' :34)³⁸."

Maksudnya dari memelihara diri adalah tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Adapun Nusyuz dalam Al-Qur'an yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

³⁸ DEPAG RI, *op.cit*, Q.S An-Nisa' : 34.

D. Statistik kesalahan *Matrimoni* terhadap kesalahan menganiaya Istri di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi Tahun 2009-2010

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa AUKI W.P 1984 telah menetapkan dengan jelas tentang kesalahan matrimoni menganiaya istri di Mahkamah wilayah persekutuan. Amalan ini terus berlaku walaupun undang-undang telah membuat peraturan dan hukuman terhadap kesalahan tersebut. Kasus ini diklasifikasikan sebagai kasus jenayah dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan. Untuk melihat sejauh mana kesalahan-kesalahan matrimoni terhadap penganiayaan istri yang berlaku di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, akan diuraikan secara terperinci didalam bab ini. Penguraian tersebut akan disertakan dengan jadual dan table bertujuan untuk memudahkan lagi pemahaman terhadap kesalahan yang berlaku.

Disamping itu juga, dalam bab ini penulis akan menyertakan contoh-contoh kasus, ia sebagai bukti bahwa kasus-kasus tersebut benar-benar berlaku dan sekaligus melihat apakah keputusan yang telah dibuat oleh Hakim.

Menurut data terbaru yang penulis dapatkan daripada pihak Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ditemui bahwa jumlah statistik daftar kesalahan Matrimoni bagi kesalahan suami menganiaya Istri di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari Bulan Januari tahun 2009 hingga Bulan September 2010 ialah sebanyak 218 kasus. Tahun 2009 mencatatkan jumlah kasus sebanyak 86 kasus, dan di tahun 2010 mencatat jumlah kasus sebanyak 132 kasus.

Ini adalah Data terupdate dari Statistik Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

TABEL 2
***Laporan Daftar Kasus Matrimoni Kesalahan Menganiaya Istri Di
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2009***

No	Tahun 2009/Bulan	Sisa Kasus bulan Des.2008 (A)	Daftar Kasus Terbaru (B)	Jumlah Kasus A+B (C)	Jumlah Kasus yang disidangkan (D)	Jumlah Kasus Yang Selesai (E)	Jumlah kasus yang Tertunda C+E (F)
1	Januari	5	4	9	9	9	0
2	Februari	0	8	8	8	5	3
3	Maret	3	5	8	8	5	3
4	April	3	0	3	3	3	0
5	Mei	0	9	9	9	5	4
6	Juni	4	1	5	5	5	0
7	Juli	0	3	3	3	3	0
8	Agustus	0	9	9	9	6	3
9	September	3	2	5	5	5	0
10	Oktober	0	11	11	11	7	4
11	November	4	2	6	6	6	0
12	Desember	0	10	10	10	5	5

Catatan : Data diatas diambil dari Dokumen Statistik Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, tanggal 9-09-2011

Dari catatan statistik diatas menunjukkan daftar kasus (A+B) tahun 2009 sebanyak 86 kasus dengan presentase 100% , dan kasus yang telah diselesaikan Daftar kasus (E) tahun 2009 sebanyak 64 kasus dengan presentase 74,42%, manakala sisa Kasus yang tertangguh (C+E) sebanyak 22 kasus dengan presentase 25,58%.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus kesalahan matrimoni menganiaya terhadap istri ini sedikit berbanding kasus-kasus lain yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, namun dari hasil penelitian ini

bahwa kasus kekerasan terhadap istri ini masih terjadi pada setiap tahun. Berdasarkan tabel diatas, jumlah daftar kasus (B) yang paling banyak adalah pada bulan Oktober tahun 2009, dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus. Sedangkan pada bulan April 2009 tidak mencatatkan kasus yang didaftarkan di Mahkamah syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Dari hasil wawancara penulis dengan penolong pendaftar bahwa kasus kesalahan matrimony tersebut statistik kasusnya naik turun, ini disebabkan ada sebagian masyarakat yang mengetahui aturan hukum terhadap kasus kekerasan rumah tangga tersebut, dan ada juga yang kurang memahami tentang hal tersebut, akan tetapi kebanyakan dari kasus tersebut banyak istri yang mendaftarkan perceraian mereka dengan latar belakang suami sering menganiaya istrinya tersebut³⁹

³⁹, Abdul Ghani bin kiflie, Ketua Pendaftar Mahakamah syariah wilayah Persekutuan KL, *Wawancara*, Tanggal 22 September 2011, jam 10. 12. am

TABEL 3
Laporan Daftar Kasus Matrimoni Kesalahan Menganiaya Istri Di
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2010

No	Tahun 2010/Bulan	Sisa Kasus Bln.Des 2009 (A)	Daftar Kasus Terbaru (B)	Jumlah kasus A+B (C)	Jumlah Kasus Yang di Sidangka n (D)	Jumlah Kasus yang di Selesaika n (E)	Jumlah Kasus Tertunda C+E (F)
1	Januari	5	13	18	18	10	8
2	Februari	8	15	23	20	12	11
3	Maret	11	10	21	21	18	3
4	April	3	8	11	11	11	0
5	Mei	0	10	10	10	7	3
6	Juni	3	12	15	15	13	2
7	Juli	2	14	16	10	10	6
8	Agustus	6	5	11	11	11	0
9	September	0	7	7	7	5	2

Catatan: data yang diperoleh dari Dokumen Statistik Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 9-09-2011.

Dari catatan statistik diatas menunjukkan daftar kasus (A+B) tahun 2010 sebanyak 132 kasus dengan presentase 100% , dan kasus yang telah diselesaikan Daftar kasus (E) tahun 2009 sebanyak 97 kasus dengan presentase 73,49%, manakala sisa Kasus yang tertangguh (C+E) sebanyak 35 kasus dengan presentase 26,51%.

Data tabel pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kasus kesalahan matrimony menganiaya terhadap istri ini meningkat berbanding kasus-kasus pada tahun 2009 yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, namun dari hasil penelitian ini bahwa kasus kekerasan terhadap istri ini masih terjadi pada setiap tahun. Dan Berdasarkan tabel diatas, jumlah daftar kasus (B) yang paling banyak adalah pada bulan Februari tahun 2010, dengan

jumlah kasus sebanyak 15 kasus. Dan pada tahun 2010 tidak mencatatkan kasus yang tidak didaftarkan di Mahkamah syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.⁴⁰

1. Penetapan peraturan dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984

Akta Undang-undang Keluarga Islam memberlakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan anak, dan sebagainya. Akta ini terpakai kepada semua orang Islam yang tinggal di Wilayah Persekutuan atau bagi mereka yang bermastautin di Wilayah Persekutuan.

Terdapat 135 seksyen yang membicarakan tentang hal ehwal keluarga islam dalam AUKI dan dibagi kepada 10 bagian, yaitu:

Bagian (I) : Permulaan (Muqadimah)

Termasuk didalamnya tafsiran dan pemakaian

Bagian (II) : Perkahwinan

Diperuntukkan mengenai orang-orang yang boleh mengkad Nikahkan perkahwinan, pertunangan, permohonan untuk berkahwin.

Bagian (III) : Pentadbiran Perkahwinan (Administrasi Perkawinan)

Memperkatakan mengenai surat perakuan nikah dan ta'liq, pendaftaran perkahwinan luar Negara bagi yang bermastautin di wilayah Persekutuan, pelantikan Ketuan Pendaftar, Pendaftar dan Lain-lain.

⁴⁰ *Ibid*, Abdul Ghani Bin Kifli, tgl 22 September 2011, jam 10.30 am

Bagian (IV):Penalti (kesalahan) dan Pelbagai (lain-lain) Penetapan

Berhubungan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkahwinan.

Mengenai gangguan terhadap perkahwinan, kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkahwinan, pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.

Bagian (V) : Pembubaran Perkahwinan

Menyentuh berkenaan dengan Cerai, Talaq, Ta'liq, Khul, Li'an, Ruju'.

Bagian (VI) :Nafkah Isteri, Anak dan Lain-lain

Yaitu kuasa Mahkamah untuk memerintahkan Nafkah, Pentaksiran Nafkah, Kewajiban untuk menanggung nafkah dan lain-lain.

Bagian (VII) : Penjagaan (Hak Asuh Anak)

Orang yang berhak menjaga anak-anak, kelayakan penjaga dan yang berkaitan.

Bagian (VIII) :Pelbagai (lain-lain)

Mengenai pengiktirafan perkahwinan, Persetubuhan Syubhah, Syarat-syarat bagi perakuan yang sah dan lain-lain.

Bagian (IX) : Penalti (kesalahan)

Termasuk poligami tanpa kebenaran Mahkamah, Perceraian diluar Mahkamah, tidak membuat laporan, Meninggal langsung Isteri, dan lain-lain.

Bagian (X) : Am (Umum)

Kuasa untuk membuat kaedah-kaedahdan pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor 3/52.

Daripada pembagian yang dibuat, didapati bahwa kesalahan matrimoni diperuntukkan dalam bagian ke 9 yaitu Penalti (Kesalahan) mempunyai 11 seksyen bermula dari seksyen 123 hingga seksyen 133. Sedangkan kesalahan suami menganiaya isteri diatur dalam seksyen 127 Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 (Akta 303)⁴¹.

⁴¹ Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Dewan Negara dan Dewan Rakyat, *AUKI 1984*, (Kuala Lumpur: jabatan Kehakiman,1984).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk-bentuk Kesalahan Matrimoni Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 (akta 303).

Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif yang secara teori bersifat ‘*independen*’ berfungsi mengadili berbagai perkara yang ada di tengah masyarakat. Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif mengadili perkara hukum di lingkungan privat (peribadi) khususnya kasus-kasus yang lahir dalam rumah tangga misalnya di bidang perceraian, *thalaq*, *rujuk*, waris dan sebagainya. Secara hukum, keluarga yang berpekar dapat mencari jalan penyelesaian akhirnya di Mahkamah Syariah tersebut, misalnya perceraian antara suami istri. Ketika antara suami dan istri konflik namun ditempuh jalan musyawarah tidak kunjung selesai, maka penyelesaian final (ending) dari konflik adalah perceraian.

Perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan hakim di mahkamah. Akan tetapi konflik antara suami dan istri yang penyelesaian akhirnya tidak di depan hakim di mahkamah, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah atau dikenal dengan perceraian di bawah tangan (*under hand*) tanpa persetujuan hakim di Mahkamah. Meskipun seorang suami telah menjatuhkan thalaq atas istrinya lebih dari tiga kali.

Fenomena kasus Matrimoni atas kesalahan menganiaya isteri banyak sekali dijumpai ditengah-tengah masyarakat, terutamanya dikota besar Kuala Lumpur. Ada sebagian mereka yang ragu-ragu untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak Mahkamah atau JAWI karena diliputi rasa takut dan kurang

mengetahui tentang kasus Matrimoni tersebut. Padahal pihak berwenang Mahkamah/ JAWI sangat prihatin dengan kasus tersebut. Bukan saja isteri yang akan dirugikan tetapi juga anak dan keluarga yang menanggung hal tersebut. Menurut pengamatan penulis di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ada 218 kasus yang di laporkan ke Mahkamah dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Jumlah tersebut sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan kejadian yang penulis ketahui yang berlaku di Ibu kota. Akibat dari kesalahan Matrimoni menganiaya istri tersebut, pernikahan mereka tidak bias berlanjut kembali, istri-istri yang melaporkan kasus tersebut banyak yang memilih bercerai daripada suaminya. Menurut pegawai pendaftar di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Tn.Abdul Ghani Bin Khiflie "Kasus seperti ini banyak terjadi disebabkan Ekonomi keluarga seperti suaminya tidak bekerja, ada juga suaminya yang memang panas baran (Emosi), dan banyak faktor lainnya yang menjadi penyebab kasus tersebut terjadi"¹.

1. Jenis-jenis Kesalahan Matrimoni

Kesalahan-kesalahan matrimony dibawah AUKI 1984, boleh dibagikan kepada tiga bagian yaitu kesalahan yang dilakukan Suami, Kesalahan yang dilakukan Istri, Kesalahan bersama oleh suami istri. Secara ringkas pembagian tersebut adalah :

a) Kesalahan Suami

1) Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

¹, Tuan Abdul Ghani Bin Khiflie, Pendaftar MSWP KL, *Wawancara* Tanggal 10-09-2011, Jam 09.00

Maksud dari poligami tanpa kebenaran Mahkamah adalah seorang laki-laki yang hendak berpoligami, tetapi dia tidak meminta izin tertulis dari Mahkamah. Dalam seksyen 123 AUKI W.P 1984 menjelaskan : Jika seorang lelaki berkawin lagi di mana-mana tempat sekalipun dalam masa perkawinannya selama masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Hal ini banyak terjadi di Malaysia, seorang suami yang melakukan perbuatan tersebut biasanya dilakukan di Thailand Karena faktor geografis antara Malaysia dan Thailand sangat berdekatan., dan juga dilakukan didalam Negara malaysia dengan perkhidmatan sindiket atau Qadhi yang tidak mendapatkan Tauliah (izin). Dalam kasus ini yang akan dirugikan adalah istri dan anak, jika tidak didaftarkan segera, istri tidak dapat menuntut hak waris, dan si anak tidak mendapatkan Akta Lahir nya. Akan tetapi, Jika mereka ingin melegalkan perkawinannya di mahkamah, harus mendaftarkan perkawinan tersebut ke Jabatan Agama Islam, Dan pihak Mahkamah akan menyelidiki pernikahan mereka dari segi keabsahannya (Sah atau Tidak Sahnya) pernikahan tersebut².

2) Perceraian diluar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah

Maksudnya, seorang suami yang melafazkan Talaq tidak di depan Hakim Mahkamah. Dalam seksyen 124 AUKI WP menjelaskan : Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar

² Pn. Murni Rahimah, Penolong Pendaftar MSWP KL, *Wawancara*, Tanggal 2 Oktober 2011, jam 9.00 am

Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Walaupun didalam hukum Islam perbuatan tersebut sah saja, namun tetap harus di daftarkan terlebih dahulu ke mahkamah, agar mendapatkan bukti tertulis bahwa perceraian tersebut telah terjadi, hal ini untuk kemaslahatan bersama. Terutamanya kaum isteri yang akan merasa di rugikan dengan hal tersebut. Jika tidak dilegalkan hal tersebut, maka isteri tidak dapat menuntut harta gono gini, dan hak asuh penjagaan anaknya. Jika kasus ini didaftarkan ke Mahkamah, Hakim akan meneliti berapa kali suami tersebut telah melafazkan Talaq diluar Mahkamah. Jika hal tersebut telah terbukti maka Hakim akan memutuskan hal tersebut³.

3) Meninggal langsung Istri

Maksudnya adalah, seorang suami meninggalkan istri lebih dari 4 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, dan tidak ada kabar sehingga ada unsur kesengajaan. Maka kasus tersebut termasuk kesalahan di bawah Seksyen 126 AUKI WP 1984, menjelaskan : Jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan isterinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

³ *Ibid*, tanggal 2 Oktober 2011, jam 9.00 am

4) Menganiaya Istri

Seorang suami yang melakukan penganiayaan terhadap isterinya baik fisik ataupun non fisik, atau menyalah gunakan harta istri untuk kepentingan pribadi, kasus ini berkenaan dengan Seksyen 127 AUKI WP 1984 : Seseorang yang menganiaya istrinya atau menipu harta istrinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Kebiasaannya hal ini menjadi pemicu alasan suami istri untuk bercerai. Kasus perceraian banyak di latarbelakangi oleh kasus tersebut.

5) Tidak memberi keadilan sewajarnya

Maksud hal tersebut berlaku bagi suami yang beristri lebih dari satu atau poligami. Akan tetapi suami tersebut tidak memberikan keadilan sewajarnya, sehingga menimbulkan berbagai konflik dan tuntutan. Hal ini berkenaan dengan seksyen 128 AUKI WP 1984 : Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajar kepada istrinya mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu⁴.

b) Kesalahan Istri

1) Nusyuz / tidak menurut perintah

Istri yang Nusyuz maksudnya tidak mentaati perintah suami, atau durhaka kepada suami, contoh familiarnya seperti isteri keluar tanpa seizin suaminya. Hal tersebut berkenaan dengan seksyen 129 AUKI WP 1984, yang

⁴ *Ibid*, tgl 2 Oktober 2011, jam 9.00 am

menjelaskan bahwa : Seseorang perempuan/isteri yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit. Kasus tersebut juga banyak aduan dari para suami yang mendaftarkan ke Mahkamah Syari'ah, sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian.

c) Kesalahan bersama

1) Murtad untuk membatalkan perkahwinan

Murtad maksudnya seseorang yang keluar agama Islam dan memeluk agama lain dengan sengaja karena menginginkan batalnya pernikahan mereka. Dalam hal kesalahan ini salah seorang pasangan suami isteri keluar dari Agama Islam ke Agama lain dengan sengaja, atau atas hasutan orang lain, maka kasus ini menyebabkan perkawinannya batal. Kasus ini bersalahan dengan seksyen 130 AUKI WP 1984 : Seseorang yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum penjara tidak melebihi setahun.

Dalam kasus ini Akta Undang-undang Keluarga Islam tidak memberikan denda berupa uang, tetapi hanya hukuman penjara tidak lebih dari 1 tahun.

Karena selain menyangkut masalah keluarga kasus ini juga menyangkut hal Aqidah.⁵.

2) Persetubuhan bagi kesalahan matrimony

Maksudnya adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai kemudian tinggal bersama tanpa adanya rujuk di depan Mahkamah (izin Rujuk tertulis secara Legal), Sepertimana di jelaskan dalam seksyen 131 AUKI WP 1984 :

- a) Seseorang lelaki yang, setelah menceraikan dengan sah isterinya, bersekedudukan semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan rujuk yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
- b) Jika istrinya itu tidak tahu pada masa persekedudukan semula itu tentang telah berlakunya perceraian itu, maka suami itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
- c) Seseorang perempuan yang bersubahat melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Kasus tersebut jarang berlaku, karena sedikit banyaknya masyarakat memahami hal berkaitan dengan rujuk. Juga kebiasaannya dari segi faktor lingkungan dan pemahaman tentang Agama⁶.

⁵,tn. Abdul Ghani Bin Kiflie, Pendaftar MSWP, *Wawancara* Tgl. 5 Oktober 2011, jam 13.00 pm

2. Bentuk-bentuk kesalahan Matrimoni menganiaya istri.

Maka di kemukakan bentuk-bentuk kekerasan di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik cukup sering terjadi dalam relasi suami istri. Apa yang dilakukan suami sangat beragam, mulai menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan pisau, bahkan membakar. Beberapa kasus terjadi di mana istri mengalami cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa karena kekerasan yang dilakukan suami. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.

Contoh kasus kekerasan fisik : Nik Abdullah Bin Nik Zamri No KTP: 770912-06-8027, dengan No. Daftar Kasus : 14002-010-0012-2009, terdakwa telah memenuhi panggilan mahkamah Wilayah Persekutuan K.L pada tanggal 12-08-2009 atas tuduhan telah melakukan kesalahan di bawah Akta (A902) seksyen 127 AUKI WP 1984 tentang kesalahan menganiaya Istri yang berupa penganiayaan fisik terhadap istrinya Rinna Binti Zulkiffli, perbuatan penganiayaan fisik terhadap mantan Istrinya selama 3 tahun Perkawinannya. Pada sidang kedua tanggal 24-09-2009 Hakim memutuskan hukuman terhadap pesalah/terdakwa dengan Hukuman denda tidak melebihi RM.500 dan penjara tidak melebihi 6 bulan. Hukuman ini berkuat kuasa tanggal 24-09-2009.⁷

⁶ *Ibid*, tgl 5 Oktober, Jam 13.00 pm

⁷ Analisis dokumen, Buku Daftar Kes Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan K.L, No. 14002-010-0012-2009

2. Kekerasan Non Fisik

Pada kekerasan non fisik (psikologi), dampak yang dirasakan lebih menyakitkan dari kekerasan secara fisik. Kekerasan non fisik ini merupakan suatu tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri seorang istri dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapat, yang akhirnya istri menjadi penurut dan selalu tergantung pada suami dalam segala hal.

Bentuk kekerasan non fisik ini sulit dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan secara lahiriah, tetapi berdampak pada batin si istri yang dapat mengakibatkan derita yang sangat sulit disembuhkan. Kekerasan psikologis juga merupakan frekuensi dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam, membentak, memaki dan sebagainya.

Contoh kasus non kekerasan fisik : Abdul Rahman Bin Ku Saleh No KTP: 741011-02-6179, dengan No. Daftar Kasus : 14002-010-0098-2010, terdakwa dipanggil ke Mahkamah Wilayah Persekutuan K.L pada tanggal 20-07-2010 atas tuduhan telah melakukan kesalahan di bawah Akta (A902) seksyen 127 AUKI WP 1984 tentang kesalahan menganiaya Istri yang berupa penganiayaan non fisik terhadap istrinya Siti Khadijah Binti Ahmad yang bekerja sebagai pedagang. Terdakwa yang bekerja di kilang besi sering berjudi dan minum-minuman keras, selain itu tergugat juga dikehendaki berselingkuh dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap istrinya. Sehingga istrinya memfailkan kasus perceraian ke

Mahkamah dengan alasan hal tersebut, walau bagaimanapun tertuduh di dakwa atas kesalahan menganiaya istri yang berkaitan dengan seksyen 127 AUKI WP 1984. setelah meneliti berkas perkara Pada tanggal 20-07-2010 Hakim memutuskan hukuman terhadap pesalah/terdakwa dengan Hukuman denda tidak melebihi RM.500 dan penjara tidak melebihi 1 bulan. Hukuman ini berkuat kuasa tanggal 20-07-2010.⁸

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap istri, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan seksual ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi mendahului saat atau setelah hubungan seks dan sebagainya.

Kasus kekerasan seksual tidak ada kasus yang di failkan di Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

4. Kekerasan Ekonomi

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain: untuk mengontrol perilaku istri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu istri juga dilarang bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil,

⁸ *Analisis dokumen*, Buku Daftar Kes Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan K.L, No. 14002-010-0012-2009

bertahap-tahap, hanya bila istri melakukan apa yang diinginkan oleh suami.⁹ Suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, dan membiarkan istri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak, suami sengaja menghamburkan uang sementara istri dan anak berkurangan, suami memaksa istri mencari uang, suami mempekerjakan istri atau juga suami mengambil, menguasai uang dan barang milik istri dengan berbagai cara dan alasannya. Konflik yang lebih serius apabila suami meninggalkan istri dalam keadaan suami tidak meninggalkan apa-apa sumber ekonomi pada istri.

Contoh Kasus kekerasan Ekonomi : Suhaimi Bin Abdullah, No KTP : 650908-07-6179, dengan No Daftar Kasus : 14002-058-0819-2010. Tergugat di panggil ke Mahkamah Syariah WP.KL pada tanggal 17-05-2010 karena di tuduh bersalah menyalah gunakan Harta isterinya Lily Sofia Binti Ismail, yang bekerja sebagai Assisten Administrasi Umum. Tergugat yang tidak bekerja terpaksa menyalah gunakan harta isterinya untuk kepentingan pribadinya, walau bagaimanapun tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya, Ia dijerat hukuman mengikut seksyen 127 AUKI WP 1984 tentang menganiaya isteri, Hakim memutuskan hukuman terhadap tergugat dengan hukuman denda tidak melebihi RM.1,000, hal ini berkuat kuasa pada tanggal 17-05-2010¹⁰.

⁹ Zalinah Binti H.Said, bahagian Sulh Mahkamah syariah Wilayah Persekutuan, *Wawancara*, tanggal 3-09-2011. Jam 14.00 pm

¹⁰ Buku Daftar Mahkamah Syariah W.P K.L, *Op.cit*, No. 14002-058-0819-2010

TABEL 4.1
KASUS KESALAHAN *MATRIMONI* MENGANIAYA ISTRI DI
MAHKAMAH SYARIAH W.P K.L

NO	KESALAHAN	FREKWENSI	PRESENTASE
1	Kekerasan Fisik	10	47.6%
2	Kekerasan Non Fisik	5	23.8%
3	Kekerasan Seksual	0	0
4	Kekerasan Ekonomi	6	28.5%
Jumlah		21 Kasus	10%

Catatan: Data tabel di atas diperoleh dari hasil wawancara dan Analisis Dokumen Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tanggal 03-09-2011

Dari Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa kasus kesalahan matrimony menganiaya isteri yang terjadi mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang lebih banyak terjadi dari hasil penelitian adalah Kekerasan Fisik sebanyak 10 Kasus (47.6%), dan kekerasan Seksual tidak di catatkan sama sekali, karena tiada kasus yang terdaftar di Mahkamah syariah W.P K.L.

Dari tabel diatas dapat di fahami bahwa kasus yang banyak terjadi di laporkan ke mahkamah syariah W.P K.L adalah kasus kekerasan Fisik, yang kedua adalah Kekerasan Ekonomi yang mencatatkan sebanyak 6 kasus (28.5%), ini disebabkan karena faktor lingkungan sosial, dan pengaruh lainnya. Sebagian penduduk yang tinggal di Ibu Kota banyak terjadi kasus-kasus seperti ini, karena suami yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarganya.

TABEL 4.2

SANKSI HUKUM TERHADAP KESALAHAN *MATRIMONI* DI

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN K.L

NO	SANKSI HUKUM	FREKWENSI	PERSENTASE
1	PENJARA	5	23.8%
2	DENDA	7	33%
3	PENJARA DAN DENDA	9	43%
JUMLAH		21 KASUS	10%

Catatan: Data tabel di atas diperoleh dari hasil wawancara dan Analisis Dokumen Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tanggal 03-09-2011

Dari Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sanksi kesalahan matrimony menganiaya isteri yang terjadi mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang lebih banyak terjadi dari hasil penelitian adalah sanksi dengan hukuman penjara dan denda sebanyak 9 Kasus (43%), sanksi hukum ini yang lebih banyak diputuskan terhadap kasus kesalahan matrimony menganiaya di Mahkamah syariah W.P K.L. Dari tabel diatas dapat di fahami bahwa kasus yang banyak terjadi di laporkan ke mahkamah syariah W.P K.L adalah kasus kekerasan Fisik, dan denda diterima oleh si pesalah adalah penjara dan denda (kedu-duannya sekali) yang kedua adalah sanksi hukum denda yang mencatatkan sebanyak 7 kasus (33%). Karena faktor lain-lain seperti membuat rayuan dari tergugat dan permohonan dari pihak penggugat untuk mengganti kerugian dilihat dari segi kasusnya, kebanyakan dari kasus ini adalah penyebab terjadinya kasus perceraian meningkat di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan K.L.

Berhubung dengan bidang kekuasaan negara, maka apabila permasalahan yang terjadi di Wilayah Persekutuan tidak dapat diselesaikan, maka negara berkuasa untuk menentukan penyelesaiannya, karena kekuasaan perlembagaan persekutuan dan undang-undang masih di bawah kekuasaan negara. Dengan masih mendominasinya kekuasaan pemerintah, maka bisa menimbulkan pemaksaan dalam membuat atau memberikan keputusan bagi orang Islam bahkan sering mengundang polemik dan isu hangat yang nampaknya belum dapat diselesaikan.

Penulis menganggap dari satu sisi kekuatan hukum Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 masih mengandung kelemahan, dari segi ruang gerak dan kekuasaannya yang tidak merdeka. Keputusan-keputusan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 ini masih bermuara dan bergantung kepada kekuasaan pemerintah¹¹.

1. Sebab-sebab Terjadinya Kesalahan-kesalahan *matrimoni* Terhadap Menganiaya Istri.

kasus kesalahan *matrimoni* banyak terjadi di masyarakat umumnya, khususnya di daerah Kuala Lumpur, karena Kuala Lumpur merupakan ibu Negara Malaysia yang mana masyarakat disana sudah mengalami kemajuan yang pesat baik dalam pekerjaan, Ilmu pengetahuan, dan sosial Budaya.

Penulis akan menguraikan tentang sebab-sebab terjadinya kesalahan *matrimony* menganiaya istri yang berlaku di masyarakat Kuala Lumpur,

¹¹ Zalinah Binti H.Said, *Op.cit*, tanggal 3-09-2011. Jam 14.00 pm

berdasarkan analisa dokumen, wawancara, dan Observasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus kesalahan matrimony tentang menganiaya isteri.

Faktor terjadinya kesalahan matrimoni menganiaya isteri :

a) Tanggungjawab

Suami yang pengangguran : Alasan ini sangat sering menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan matrimony menganiaya isteri di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, suami yang tidak bekerja akan mengandalkan uang daripada istrinya. Bahkan yang lebih memilukan hati sang suami yang tidak bekerja tersebut menyalah gunakan pemberian istri untuk berfoya-foya berjudi, meminum-minuman keras bahkan untuk biaya pernikahannya kali kedua. Bahkan ada juga gaji sang istri yang bekerja dipaksa harus diserahkan semua kepada suaminya, dengan alasan uang tersebut adalah hak bersama dan suami adalah kepala keluarga¹². Kasih sayang di antara suami istri haruslah sering dipupuk supaya senantiasa mekar dan bersemarak. Jika gagal atau tidak berusaha kearah tersebut maka rasa kasih sayang tersebut akan pudar dan berkurangan, jika keadaan ini berlanjutan akan menimbulkan bibit-bibit krisis hubungan suami istri yang pada akhirnya akan menghancurkan rumahtangga.¹³

b) Suami panas baran atau Emosional

Suami yang emosional cenderung menjadi factor keributan dirumah tangga, bahkan salah faham boleh menyebabkan suami hilang akal warasnya, jika suami sudah kehilangan timbang rasanya karena dikuasai oleh emosinya suami

¹² Abdul Ghani Bin Kiflie, Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, *Wawancara*, Tanggal 22 September 2011, jam.10.12 am.

¹³ *Ibid.*

sanggup memudaratkan atau mencederakan isterinya sendiri. Faktor emosi ini sendiri boleh dipicu akibat stress di tempat kerja, cemburu, salah faham, atau campur tangan pihak ke tiga.¹⁴

c) Suami mati Pucuk atau Impotensi

Masalah seksual didalam sebuah perkawinan merupakan sebuah tuntutan biologikal. Sikap dingin dalam hubungan suami istri, nafsu yang tinggi, nafsu yang rendah dan enggan melakukan hubungan suami istri. Hal ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan matrimony berlaku di tengah masyarakat Wilayah persekutuan. Suami yang tidak dapat menjalankan tugasnya memberikan nafkah batin terhadap istrinya akan memicu terjadinya perang dingin. Jika tidak diselesaikan segera boleh memberi kesan yang buruk terhadap status sang istri. Kebahagiaan rumah tangga bukan saja berasal dari harta yang banyak, suami yang lemah lembut, tapi dari kebutuhan batiniahnya juga harus terpenuhi. Karena dari nafkah batin tersebut boleh menghasilkan keturunan yang sangat diidam-idamkan pasangan suami istri.¹⁵

d) Faktor Komunikasi

Kegagalan pasangan suami istri untuk berkomunikasi dengan berkesan selalunya akan membawa implikasi yang buruk terhadap sebuah rumah tangga. Komunikasi agresif seringkali terjadi didalam hubungan suami isteri. Dimana suami isteri memaksa pasangannya menerima sesuatu pendapat. Hal ini seringkali menimbulkan reaksi pertengkaran. Contoh dari komunikasi agresif adalah

¹⁴ Analisa data, Buku Daftar Mahkamah syari'ah Wilayah Persekutuan, No.14008-010-0098-2009

¹⁵ Abdul Ghani Bin Kiflie, *Op.cit*, tanggal 22 September 2011, jam 10.12 am.

paksaan : memaksa pasangan menerima apa yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang keras dan kasar, penilaian : member penilaian kepada suatu perkara dengan cara merendah-rendahkan pasangan. Suka menyalahkan: apabila pasangan sedang marah dan tidak mengetahui akan penyebabnya, ia akan mulai mencari sasaran untuk melepaskan kemarahannya itu.

e) Faktor orang ketiga

Dalam konflik rumah tangga juga kadang kala terjadi oleh campur tangan orang ketiga, seperti pasangan selingkuh, hal ini faktor dari pergaulan, persekitaran, juga stress. atau terlalu ikut campurnya keluarga dalam masalah suami isteri, seperti pasangan suami isteri tinggal bersama keluarga salah satu pasangan (isteri/suami), masalah keturunan bisa dituntut oleh keluarga mertua, dan masalah kecil juga bisa di besar-besarkan.

Dari penjelasan sebelumnya, penulis dapat mengenal kesalahan-kesalahan matrimony yang boleh dikategorikan dalam kesalahan suami adalah lebih banyak berbanding dengan kesalahan isteri. Ini disebabkan Karena kewajiban suami terhadap isteri khususnya dan keluarganya sangat banyak. Disamping itu, telah dijelaskan nas-nas tentang kewajiban seorang suami. Dan sekiranya suami itu ingkar, dia telah melakukan kesalahan. Manakala kesalahan isteri terdiri dari daripada beberapa jenis kesalahan tetapi dirangkumi dalam Nusyuz dan dilihat sebagai satu kesalahan saja.

B. Sanksi Hukum Bagi kesalahan matrimoni terhadap menganiaya Isteri dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984.

AUKI 1984 dalam seksyen 127, diperuntukkan bagi seseorang yang menganiaya isterinya atau mempergunakan harta isterinya dengan sewenang-wenang adalah termasuk kedalam kesalahan matrimony dan hendaklah dihukum Denda tidak melebihi RM.1,000 atau Penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Kesalahan matrimony sepertimana yang diperuntukkan dalam AUKI 1984 adalah tidak banyak berbeda dengan apa yang diutarakan dalam Undang-undang Islam. Terdapat beberapa persamaan jenis kesalahan, diantaranya tidak memberi nafkah dan isteri yang ingkar pada perintah suami atau Nusyuz, namun begitu ada kesalahan yang diperuntukkan didalam AUKI tidak ada dalam Undang-undang Islam. Contohnya : perceraian diluar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.

Disamping itu juga bentuk-bentuk hukuman yang dibuat dalam AUKI adalah lebih kurang sama, kebanyakan kesalahan yang dibuat akan dikenakan hukuman Denda tidak melebihi RM. 1,000, atau penjara tidak melebihi 6 Bulan, atau kedua-duanya sekali.

1. Kasus Pertama dengan Nomor Daftar : 14002-058-0819-2010

Pertuduhan (Gugatan)

Nama Tertuduh	: Suhaimi Bin Abdullah
No.K/P	: 650908-07-6179
Alamat	:Jl.Hang Tuah 1/5, No.14 Bandar sri Hartamas,50676 Kuala Lumpur.
Pasal	:Akta A902, Seksyen 127 AUKI 1984.

Pendakwa Syarie lawan Jaafar Shadiq Bin Zaenal , tergugat pada tanggal 17-05-2010, dipanggil ke Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan karena dituduh bersalah Menyalah gunakan harta isterinya penggugat Lily Sofia bt Ismail yang berkerjaya sebagai pembantu pentadbiran awam, tergugat yang tidak bekerja terpaksa menyalah gunakan harta isterinya untuk kepentingan pribadinya. Tindakan tersebut telah melanggar AUKI wilayah persekutuan 1984, tergugat dituduh melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dibawah seksyen 127 Akta A902 AUKI Wilayah Persekutuan 1984.

Putusan Mahkamah

Setelah meneliti segala gugatan dan bukti yang diberikan oleh pendakwa Syar'i. maka Hakim memutuskan bahwa pihak tertuduh, Suhaimi Bin Abdullah, No K/P: 650908-07-6179, adalah bersalah atas kesalahan yang dilakukan dan dikenakan Denda tidak melebihi RM.1,000 di bawah seksyen 127 Akta A902, yang berkuat kuasa bermula pada tanggal 17-05-2010¹⁶.

2. Kasus Kedua dengan No.Daftar : 14002-010-0012-2009

Pertuduhan (Gugatan)

Nama Tertuduh : Nik Abdullah Arsyad Bin Nik Zamri

NO.K/P : 770912-06-8027

Alamat : No. 736, Jl.Villa 1/9 Taman Villa Bougenvile, 50676,
Kuala Lumpur.

Pasal : Akta (A902) , Seksyen 127, AUKI 1984.

¹⁶*Ibid* , No. 14002-058-0819-2010

Pendakwa Syar'i lawan Nik Abdullah Arsyad Bin Nik Zamri, pada jam 09.00 pagi, tanggal 12-08-2009 telah memenuhi panggilan Mahkamah atas tuduhan menganiaya Isterinya Penggugat Rinna Binti Zulkiffli, kasus ini telah di laporkan dan difailkan pada tanggal 15-07-2009 oleh Rinna Binti Zulkiffli. Tertuduh sering melakukan penganiayaan Fisik terhadap isterinya selama tiga tahun perkahwinanya yang menurut isterinya tertuduh seorang yang panas baran/ Emosional. Walau bagaimanapun jika tertuduh terbukti bersalah maka Tergugat melanggar Akta A902 Seksyen 127 AUKI 1984.

Putusan Mahkamah

Setelah meneliti segala gugatan dan bukti yang diberikan oleh pendakwa Syar'i. maka pada tanggal 24-09-2009 Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat Nik Abdullah Arsyad bin Nik Zamri NO K/P: 770912-06-8027 terbukti bersalah dan melanggar Akta A(902) seksyen 127 AUKI 1984 karena menganiaya isterinya Rina Binti Zulkiffli dan dijatuhi Hukuman Denda tidak melebihi RM.500 setelah membuat rayuan dan penjara tidak melebihi 6 bulan. Hukuman tersebut berkuat kuasa pada tanggal 24-09-2009¹⁷.

3. Kasus Pertama dengan Nomor Daftar : 14002-010-0098-2010

Pertuduhan (Gugatan)

Nama Tertuduh	: Abdul Rahman Bin Ku saleh
No.K/P	: 741011-02-6179
Alamat	:Apartment Sri Tioman, No. 25, Lt 3 Taman Melati Setapak, 53100 Kuala Lumpur.

¹⁷ *Ibid*, No. 14002-010-0012-2009

Pasal : Akta A902, Seksyen 127 AUKI 1984.

Pendakwa syari'e lawan Abdul Rahman Bin Ku Saleh, tergugat pada tanggal 20-07-2010, dipanggil ke Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan karena dituduh bersalah Melakukan penganiayaan terhadap isterinya penggugat Siti Khadijah Binti Ahmad yang berkerja sebagai pedagang, tergugat yang bekerja di sebuah Kilang besi sering memukul dan menganiaya terhadap isterinya. Walau bagaimanapun Tindakan tersebut telah melanggar AUKI wilayah persekutuan 1984, tergugat dituduh melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dibawah seksyen 127 Akta A902 AUKI Wilayah Persekutuan 1984.

Putusan Mahkamah

Setelah meneliti segala gugatan dan bukti yang diberikan oleh pendakwa Syar'i. maka pada tanggal 20-07-2010 Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat Abdul rahman Bin Ku Saleh NO K/P: 741011-02-6179 terbukti bersalah dan melanggar Akta A(902) seksyen 127 AUKI 1984 karena menganiaya isterinya Siti Khadijah Binti Ahmad dan dijatuhi Hukuman Denda tidak melebihi RM.500 setelah membuat rayuan dan penjara tidak melebihi 1 bulan. Hukuman tersebut berkuat kuasa pada tanggal 20-07-2010¹⁸.

4. Kasus keempat dengan Nomor Daftar : 14002-054-1037-2009

Pertuduhan (Gugatan)

Nama Tertuduh : Encik Zamri Bin Mat Nor

No.K/P : 660511-06-6171

¹⁸ *Analisis Dokumen*, Buku Daftar Kes Mahkamah Rendah Syariah wilayah persekutuan, No. 14002-010-0098-2010

Alamat :Apartment Sri Tioman, No. 25, Lt 3 Taman Melati
Setapak, 53100 Kuala Lumpur.

Pasal :Akta A902, Seksyen 127 AUKI 1984.

Pendakwa syari'e lawan encik zamri Bin Mat Nor, tergugat pada tanggal 17-05-2009, telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan AUKI Wilayah Persekutuan 1984, Karena menganiaya penggugat Siti Zainab Binti Che Rasyid yang berkerja sebagai pegawai JKR , penggugat telah memfailkan Fasakh Kepada tergugat yang bekerja di sebuah Kilang besi karena sering memukul dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabterhadap isterinya. Walau bagaimanapun Tindakan tersebut telah melanggar AUKI wilayah persekutuan 1984, tergugat dituduh melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dibawah seksyen 127 Akta A902 AUKI Wilayah Persekutuan 1984.

Putusan Mahkamah

Setelah meneliti segala gugatan dan bukti yang diberikan oleh pendakwa Syar'i. maka pada tanggal 17-05-2009 Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat Zamri Bin Mat Nor NO K/P: 660511-06-6171.terbukti bersalah dan melanggar Akta A(902) seksyen 127 AUKI 1984 karena menganiaya dan tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap isterinya Siti Zainab Binti Che Rasyid dan dijatuhi Hukuman Denda tidak melebihi RM.1000 dan penjara tidak melebihi 1 bulan. Hakim menuntut pampasan harta yang pernah dia abaikan terhadap isterinya sebesar Rm.6000 tetapi Hakim memberikan penangguhan selama 1 bulan dari

tanggal pembicaraan. Hukuman tersebut berkuat kuasa pada tanggal 17-05-2009.¹⁹

Berdasarkan penelitian penulis, ternyata setiap kasus yang melibatkan kesalahan matrimony menganiaya isteri di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan didapati ada beberapa faktor penyebab yang menjadi punca terjadinya kesalahan tersebut banyak berlaku di masyarakat. Walau bagaimanapun kesalahan tersebut melanggar seksyen 127 Akta (902). Yang harus dihukum sesuai AUKI W.P 1984. Didalam Islam suami yang memudaratkan isterinya, apalagi terjadi pelukaan maka hukum yang harus dijalankan sesuai syari'at islam adalah Hukum Qisas. Akan tetapi di Malaysia Hukum yang berbasiskan Hukum Islam seperti Hudud belum dapat diterapkan., namun di Malaysia lebih memakai hukum ta'zir.

Kesalahan matrimony menganiaya isteri juga menjadi alasan terjadinya perceraian yang banyak diadukan oleh para isteri-isteri. Perkara tersebut tidak dapat dihindari walaupun telah melalui Sulh/ Mediasi. Perceraian melalui fasakh adalah ujung terakhir daripada perkawinan suami isteri tersebut.

C. Analisis Hukum Islam terhadap sanksi hukum kesalahan Matrimoni menganiaya isteri di mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan kuala Lumpur.

Dalam Putusan Sanksi Hukum terhadap kesalahan Matrimoni menganiaya isteri yang di kenakan kepada suami., sejalan dengan apa yang

¹⁹*Ibid*, No. 14002-010-0098-2010

diinginkan perspektif Hukum Islam. Karena menurut hemat penelitian dalam penetapan tersebut Hakim di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur sudah mempertimbangkan dengan adil sesuai dengan AUKI WP 1984. Dan AUKI 1984 berlandaskan Nas-Nas Al-qur'an dan As-sunnah, walaupun tidak mengenakan hukum Hudud atau Qisas dalam menangani kasus menganiaya isteri, namun Mahkamah Syariah di Malaysia ini menggunakan Hukuman ta'zir, dan Hukuman tersebut dikembalikan kepada Pemerintah untuk mengenakan hukuman yang di perkirakan sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang di lakukan.²⁰

Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa putusan dan wawancara peneliti lakukan di Mahkamah Syariaah bersifat relative dalam menetapkan putusan Sanksi Hukum terhadap kesalahan matrimony menganiaya isteri. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam 2 (Dua) bentuk salinan Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

- a) "Salinan Putusan Hakim Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan KL : (KES NO 14002-058-0819-2010) Pendakwa Syarie lawan Suhaimi Bin Abdullah , OKT pada tanggal 17-05-2010, dipanggil ke Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan karena dituduh bersalah Menyalah gunakan harta isterinya Lily Sofia Bt Ismail yang berkerja sebagai Assisten Administrasi Umum, Tergugat yang tidak bekerja terpaksa menyalah gunakan harta isterinya untuk kepentingan pribadinya. Tindakan tersebut telah melanggar AUKI wilayah persekutuan 1984, tergugat dituduh melakukan suatu

²⁰ Siti Masyitah Mahamood , *Wawancara*, Tanggal 4-09-2011 jam. 13.00

kesalahan yang boleh dihukum dibawah seksyen 127 Akta A902 AUKI Wilayah Persekutuan 1984 Dengan Hukuman sebesar Rm.1,000.

- b) “Salinan Putusan Hakim Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan KL : (KES NO 14002-010-0012-2009), Pendakwa Syar’i lawan Nik Abdullah Arsyad Bin Nik Zamri, pada jam 09.00 pagi, tanggal 12-08-2009 telah memenuhi panggilan Mahkamah atas tuduhan menganiaya Isteriny tergugat Rina Binti Zulkiffli, kasus ini telah di laporkan dan difailkan pada tanggal 15-07-2009 oleh Rina Binti Zulkiffli. Tertuduh sering melakukan penganiayaan Fisik terhadap isterinya selama tiga tahun perkahwinanya yang menurut isterinya tertuduh seorang yang panas baran/ Emosional. Walau bagaimanapun jika tertuduh terbukti bersalah maka Tergugat melanggar Akta A902 Seksyen 127 AUKI 1984. 2009 Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat Nik Abdullah Arsyad bin Nik Zamri terbukti bersalah dan melanggar Akta A(902) seksyen 127 AUKI 1984 karena menganiaya isterinya Raihanah Binti Yussof dan dijatuhi Hukuman Denda tidak melebihi RM.500 setelah membuat rayuan dan penjara tidak melebihi 6 bulan.”²¹

Dua bentuk Salinan Putusan Mahkamah Syariah Wilayah persekutuan KL di atas, merupakan dasar penelitian dalam menyimpulkan bahwa Putusan sanksi hukum terhadap kesalahan matrimony menganiaya isteri, sejalan dengan perspektif Hukum Islam di antaranya mengedepankan azas keadilan dan menghindari tindakan penganiayaan (penzaliman) yaitu menggunakan Hukuman Ta’zir. Namun Dari penganalisaan yang dibuat, dapat dilihat yaitu Hukuman bagi

²¹ Analisis Dokumen, Mahakamah syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tanggal 25-09-2011

kesalahan-kesalahan Matrimoni menganiaya isteri ini kurang berkesan dalam menangani permasalahan tersebut dari terus berlaku. Karena Malaysia Negara yang tidak menggunakan Hukuman Hudud atau Qisas dalam menangani permasalahan Ini. Hal ini hanya berkesan pada mereka yang didakwa saja. Tetapi tidak dapat menyadarkan orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Kesedaran tentang kesan atau efek jera sesuatu perbuatan yang menyalahi undang-undang itu harus ada pada masyarakat supaya kejadian yang sama tidak terus berulang pada masa yang akan datang.

Sebagian orang yang tidak mengerti hakikat ajaran islam menyangka bahwa dengan diberikannya hak talak kepada lelaki, seringkali membuat sengsara kaum wanita, bahkan seolah-olah wanita tidak mempunyai hak apa-apa dan mau tidak mau harus menerima apa adanya meski hatinya menolak.

Karena islam sebenarnya tak pernah menolak hak wanita, bahkan ia memberikan kemungkinan kepadanya untuk menuntut cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan hebat yang siapapun tidak kan tahan menderita seperti itu uterus menrus. Berdasarkan penderitaan itu, seorang wanita boleh menuntut cerai. Dan adalah kewajiban hakim untuk memeriksa kebenaran pengaduannya dengan seksama. Dan kalau ternyata benar, maka wanita tersebut boleh diceraikan oleh suaminya.

1. Perceraian karena suami tidak memberi nafkah.

Sebagian ulama terkemuka berpendapat seperti Imam malik, Imam Asy-syafi'I, Imam Ahmad, yang membolehkan perceraian antara suami isteri lewat keputusan hakim apabila suami tidak member nafkah, yaitu manakala

pihak isteri itu sendiri yang menuntut cerai, sedang si suami memang tidak mempunyai harta yang nyata. Firman Allah swt, dalam Q.S Al-Baqarah ayat :

229

أَطْلَقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*²²

ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh.

Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. Dalam menafsirkan ayat diatas mereka katakan, bahwa apabila suami itu hendak mempertahankan isterinya maka ia wajib menahannya dengan ma'ruf. Atau hendak menceraikan juga wajiblah dengan cara yang baik pula. Tidak

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Q.S Al-baqarah, ayat*
229 Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2006,

diragukan bahwa dengan memberi nafkah berarti tidak dapat mempertahankan isteri dengan cara yang ma'ruf.

2. Perceraian karena kekejaman suami.

Dalam mazhab hanafi, seorang perempuan diperbolehkan mengadukan halnya kepada hakim bila suaminya berlaku sewenang-sewenang terhadapnya. Maksudnya supaya hakim itu menyuruh suami itu berlaku baik terhadap isterinya, kemudian bila dipandang bahwa tindakan laki-laki itu sudah keterlaluan hingga patut mendapat hukuman dan pengajaran, maka hakim itu boleh memberinya hukuman edukatif yang setimpal, disamping tetap menyuruhnya memperbaiki kelakuannya dan jangan sewenang-sewenang lagi terhadap isterinya, namun sejauh itu wanita tersebut tetap belum boleh minta cerai.

Sedang dalam mazhab maliki, bila seorang wanita mengalami perlakuan yang demikian, maka ia berhak mengadukan halnya kepada hakim agar diceraikan saja dari suaminya. Yakni bila dipandang wanita itu tak mungkin hidup sejahtera dengan perlakuan suaminya yang seperti itu. Pendapat ini lah rupanya yang dianut oleh undang-undang di mesir pada materinya yang ke enam, (maksudnya: dalam kasus kekejaman suami, kepergiannya yang lama atau tidak member nafkah, seorang wanita di Indonesia berhak mengadukan halnya kepada PA berdasarkan shighat ta'lik yang diucapkan suaminya sesudah akad nikah).²³

²³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1986), hal 416, hal 418-419

Islam mengajar kaum lelaki dan wanita agar saling menyayangi dan mengasihani, lengkap-melengkapi dan bahawa ``lelaki dan wanita adalah pelindung, antara satu dengan yang lainnya" . Perkara ini merupakan salah satu landasan di dalam perhubungan antara lelaki dan wanita.

Keganasan yang berlaku dalam institusi keluarga bukanlah suatu urusan peribadi keluarga tersebut tetapi adalah merupakan suatu kesalahan dalam mal (perkawinan) islam. Ikatan perkahwinan tidak memberi hak kepada seseorang untuk bertindak ganas terhadap pasangan atau ahli keluarganya.

Di dalam Islam, perhubungan suami-isteri adalah harus dimulakan dengan kasih-sayang dan perlu dengan persetujuan isteri. Menurut Imam Ghazali, Rasulullah saw telah bersabda yang artinya :

``Janganlah kamu melontar dirimu kepada isteri seperti binatang. Haruslah ada, sebelum (kamu) bersama, penghantaran pesanan di antara kamu dan dia (isteri)". Mereka bertanya ``Pesanan apakah itu Rasulullah?". Jawab Rasulullah ``Cumbuan dan rayuan".²⁴

Di dalam konteks ini kita boleh merumuskan bahawa tidak perlu ada kekasaran yang berlaku di dalam perhubungan suami-isteri. Ia dibina atas perasaan kasih-sayang dan sifat mesra suami-isteri. Kita juga boleh merujuk kepada Surah An-Nisa pada ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

²⁴ Ibid h.418

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*²⁵

Sepertimana dalam Qawaid fiqhiyyah yaitu:

Asal kaedahnya : “الضرر يزال لا” (kemudharatan itu harus dihilangkan

dan “ضرار و لا ضرار” (tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang dimudharatakan)

Adapun kaedahnya : “ذرة المفاسد مقدم على جلب المصالح” (membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemaslahatan).²⁶

Ketidakadilan ini juga bertambah apabila seorang isteri dipaksa untuk melakukan hubungan dengan penuh keganasan.

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 juga ada memperuntukkan satu seksyen untuk tujuan menghukum penganas rumahtangga tersebut, iaitu di bawah Seksyen 127 bagi kesalahan menganiaya isteri. Sekiranya seorang menganiaya isterinya maka dia boleh dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara.

Apabila seorang isteri berasakan tindakan suaminya itu sebagai keterlaluan hingga mengundang kepada unsur kezaliman, maka tuntutan fasakh boleh diminta. Puan boleh memohon cerai fasakh (pembubaran perkahwinan atas

²⁵Q.S An-Nisa ayat 19, *Op-cit.* h.80

²⁶ Abdul Latif Muda, Rosmawati Ali Mat Zin, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd, 2000), cetakan Pertama, h.59.

arahan mahkamah) di Mahkamah Syariah. Bagi Wilayah Persekutuan, kita harus merujuk kepada Seksyen 52 (h) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 yang menyatakan bahawa suami telah menganiaya isteri sekiranya suami telah sentiasa lazim menyakiti atau telah menjadikan kehidupan isteri menderita; atau atas apa-apa alasan yang diiktiraf sah bagi membubarkan perkahwinan di bawah Hukum Syarak.²⁷ Firman Allah dalam surat An-Nisa : 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.²⁸

Para Fuqaha Islam telah mendefinisikan jenayah memukul dan mencederakan sebagai perbuatan jahat oleh seseorang atas orang lain yang tidak membawa kematian. Jenayah memukul atau mencederakan baik sengaja atau tidak sengajakepada lima jenis :

- a) Memutuskan mana-mana anggota yang disifatkan sebagai anggota badan.
- b) Menghilangkan kegunaan anggota badan.
- c) Melukakan dibagian muka dan kepala.
- d) Melukakan dibagian tubuh selain daripada muka dan kepala.
- e) Perbuatan yang tidak termasuk dalam empat jenis diatas.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45:

²⁷ Tuan Abdul Ghani Bin Kiflie, Pendaftar MSWP, Wawancara, Tgl 5 Oktober 2011, Jam 13.00 pm.

²⁸ Depag Ri, *Al-Qur'an dan terjemahan, Q.5 An-Nisa' : 93*

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”²⁹

Berlakunya perbuatan yang boleh mencederakan keselamatan anggota badan. Ini termasuk bentuk perbuatan jahat yang boleh mengakibatkan keadaan seperti memukul, melukakan, mencekik, menarik, menolak, menendang, atau memulas. Memang menjadi syarat bahawa korban perbuatan tersebut harus mendapatkan perlindungan undang-undang. Hal ini sering berlaku bukan saja di tempat umum, tapi dalam hal internal sebuah rumahtangga pun sering terjadi yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan suami isteri. Hukuman atas jenayah memukul atau mencederakan jika dengan sengaja menurut pendapat Jumhur Ulama Fuqaha hukumnya adalah Qishas, manakala Diat atau Ta'zir adalah hukuman alternatif kepada hukuman Qishas.³⁰

Rang Undang-undang di Malaysia dibentuk untuk mencegah kejahatan dari terus berlaku. Tetapi AUKI Wilayah Persekutuan 1984, tidak menetapkan

²⁹ *ibid*, Q.S Al-Maidah :45.

³⁰ Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam*, (Selangor: Tradisi Ilmu Sdn,Bhd, 2033), Cetakan Ke empat, h. 151-154

hukuman sepertimana dalam hukum islam terhadap pesalah kasus Perkawinan/matrimoni yang menganiya isteri. Tapi AUKI Wilayah Persekutuan 1984 memakai hukum Ta'zir, yang mana mengikut ketentuan pemerintah. Namun hukuman tersebut tidak memberikan efek jera, karena hukuman yang terlalu ringan dengan hanya Denda RM.1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya sekali denda dan penjara itu. Karena kasus tersebut banyak sekali terjadi di masyarakat khususnya Kuala Lumpur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kesalahan matrimoni didalam Islam dan Juga Akta Undang-undang keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 hampir sama, namun didalam akta ada yang dikategorikan kesalahan bersama, dalam Islam Tidak disebutkan. Kesalahan bersama tersebut adalah karena Murtad untuk membatalkan perkawinan, dan persetubuhan bagi kesalahan matrimoni. Adapun bentuk-bentuk kesalahan matrimoni menganiaya istri menurut AUKI WP 1984 adalah : kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi kasus perceraian fasakh yang banyak terjadi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
2. Selain kasus cerai Fasakh yang di failkan ke Mahkamah Syariah WP kuala Lumpur, Mahkamah juga mensabitkan kesalahan terhadap si pelaku dengan Sanksi Kesalahan matrimoni menganiaya isteri di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah di bawah seksyen 127 AUKI WP 1984 denda tidak melebihi Rm 1,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya sekali.
3. Sanksi yang diberikan Mahkamah adalah berupa mengenakan denda, memenjarakan, atau kedua-duanya sekali, hukuman tersebut adalah putusan

Hakim berdasarkan AUKI W.P 1984 karena kesalahan matrimoni menganiaya istri bertentangan dengan seksyen 127 Akta (902). Hukuman yang berdasarkan AUKI W.P 1984 adalah denda sebesar RM.1,000 atau Penjara tidak lebih dari 6 bulan, atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan putusan Mahkamah, Vonis denda yang dikenakan atas kesalahan matrimoni menganiaya isteri tersebut rata-ratanya kurang dari had maksimum yang diperuntukkan undang-undang sehingga hukuman yang dapat memberi rasa penyesalan tidak dapat dirasakan bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Pemberian hukuman yang hanya bersifat administratif menimbulkan rasa ringan bagi pihak yang mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya yang kurang mampu. Sedangkan hukuman penjara yang dikenakan sangat minimal sekali yaitu 6 bulan penjara.

B. Saran-saran

- Melihat dari bentuk-bentuk kesalahan matrimony tersebut, penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang, untuk lebih menekankan pada point-point tanggung jawab antara suami isteri ketika diadakannya kursus pra perkawinan, dan menjelaskan kesalahan tersebut dan sanksinya agar calon pasangan pengantin mengetahui adanya sanksi hukum terhadap pesalah kasus matrimony tersebut. Dan kepada seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dapat melindungi isterinya, melayaninya dengan baik, bukan mencederakannya atau memanfaatkan hasil jerih payahnya. Dimana letak tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya yang merupakan kewajibannya sebagai seorang suami. Pemahaman agama terhadap tanggung

jawab suami isteri yang harus lebih ditekankan dan memberikan penjelasan akibat hukum jika suami isteri melanggar kesalahan matrimony tersebut ketika calon pasangan suami isteri mengikuti kursus perkahwinan, ataupun dalam Sidang Sulh, agar perkara tersebut tidak terus berulang.

- Dalam hal ini, Rang Undang-undang dibentuk untuk mencegah kesalahan tersebut dari terus berlaku, seharusnya AUKI Wilayah Persekutuan 1984 bisa di Revisi, seperti menambahkan jumlah Maksimal hukuman penjara, atau menambahkan dengan hukuman sebat, dan selama dipenjara ada bimbingan Kauseling untuk para pesalah. Bagi pihak Mahkamah Syariah, khususnya Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur agar mengembalikan fungsi Mahkamah Syariah sesuai dengan fitrah (Islam) bertindak tegas dalam mengadili setiap kasus yang ada di tengah masyarakat. Di samping menunggu laporan dari berbagai pihak, terpenting pihak Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan KL harus bersikap Pro aktif tanpa menunggu laporan dari berbagai pihak. Dimana Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan harus terjun langsung ke lapangan. Tindakan sanksi sewajarnya harus di berikan kepada suami yang ingkar dalam tanggung jawab yang bersikap sewenag-wenang terhadap isterinya. Membuat kerjasama dengan masyarakat, atau mengumumkan di media-media elektronik tentang kesalahan-kesalahan matrimoni tersebut dan sanksi hukumnya. Agar masyarakat diluar sana tertarik untuk lebih peduli dengan sesama, dan dapat pemahaman terhadap kasus tersebut.
- Hukum Islam yang sedia ada haruslah di implimentasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan hak istri untuk mendapatkan perlindungan,

aplikasi Mahkamah Syariah harus berlandaskan dengan Hukum Islam agar peranan institusi Mahkamah sejalan menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadith.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Hornby (1995), *Oxford Advanced Learner 's Dictionary*, Fifth Edition, Oxford University Press,
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" samapai "Z"*, Bogor Pustaka Ibnu Katsiir, 2006.
- Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bin baridzbah Bukhari Al-Ja'fiy, *Sahih Bukhari, Kitab An-Nikah Juz 5-6*, Cairo: Darul Hadist, 1981/1401 H.
- As-San'ani, *Subuh Al-Salam Syarah Bulughur Maram, Juz 4*.
- Abu laits As-samarqandi, *Terjemahan Tanbihul Ghafilin (Peringatan Bagi Orang-orang Yang Lupa)*, Terjemahan Drs.H.Muchlis Shabir, MA, Semarang: PT.Karya Toha Putra, Juli 2005.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Rawamangun, Jakarta Timur: Prenada Media, Cetakan I, Juli 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung : PT.Syaamil Cipta Media, 2006.
- H.Djamaan Nur, Drs. . *Fiqh Munakahat*, Cetakan 1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terjemahan Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media, Cetakan 4, 2009.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV.Asy Syifa', 1986.
- KH.Ahmad Mudjab Mahalli & H.Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq 'Alaih, bagian Munakahat & Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan 1, September 2004.
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984*.
- Mustofa Al-khin, Dr. Dr. Mustofa Al-bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Mazhab Syafie, Menghuraikan Bab Undang-undang Kekeluargaan*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, Cetakan Pertama. 2002.

Mat Saad Abd Rahman, Dr. *Undang-undang Keluarga Islam Aturan Perkahwinan Suatu pendekatan amalan semasa*, Selangor Intel Multimedia And Publication, 2002.

Mohammad Ali Al-saboni, Az-Azwaaj Al-Islaami Al-Mukkir: Sa'aadatun wa Hashaanatun, penerjemah Hamdan Rasyid, *Pernikahan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiah, Cetakan 1, 2004.

Mohd Hasnawi, *Suami Isteri yang di Redhoi*, (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, cetakan pertama,,2004).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi Juz 1*, Terjemahan Ahmad Yuswaji, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Mat Saad Abd rahman (Prof Madya), *Undang-undang Keluarga Islam : Aturan Perkahwinan Suatu Pendekatan berdasarkan Amalan Semasa*, Kuala Lumpur: Hizbi Sdn.Bhd, 1993.

Mahyudin Abdul Hamid, *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Cetakan 3, Mesir: As-saadah.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani.1999.

Paizah Hj Ismail (prof. Madya) (Dr), *Undang-undang Jenayah Islam*, Hizbi Sdn.bhd, 1993.

Slamet Abiding, Drs. dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Sheikh Muhammad as-Sharbini al-khatib, *Mughi al-muhtaj, juz 3*, Mesir:Matbaah Mustafa al-hilbi, 1958.

Salleh Buang,Naseer Hamid, Maimoonah Hamid (1995), *Kamus Istilah Undang-undang English-Malay*, Central Law Book Corporation Sdn,Bhd.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan XIII,, Agustus 2006.